



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 102

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



RENJA PERUBAHAN



DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

    [distanbdgkab](#)

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

- e. Penutup; dan
- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketentuan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat

penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERTANIAN

Jalan Raya Soreang Km. 17, Telp. (022) 5891703 Fax. (022) 5891703 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, email : pertanian@bandungkab.go.id
Website : www.distan.bandungkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 188.4 / 1869 /Distan/2025
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pertanian yang namanya tercantum dalam lampiran I.
- KEDUA** : Tim sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas menghimpun, menyusun, mengolah, mengkaji, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Kepala Dinas Pertanian.

- KETIGA : Tim sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, tugas pokok dan fungsi secara rinci terlampir dalam lampiran II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Penetapan Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 2 Juni 2025

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG**



Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19700121 200003 2 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR : 188.4 / 1869 /Distan/2025
TANGGAL : 2 Juni 2025
TENTANG : RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN
2025 DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BANDUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG**

- I. Pengarah : Ir. Hj. Ningning Hendasah MSi (Kepala Dinas Pertanian)
- II. Ketua : Agus Mulya, SPt. MM (Sekertaris Dinas)
- III. Sekertaris : Soni Sopiana, SPi MIL (JF Perencana Ahli Muda)
- IV. Anggota : - Kepala Bidang Sarana
- Kepala Bidang Prasarana
- Kepala Bidang Pelayanan Usaha dan Pengendalian
Penanggulangan Bencana
- Kepala Bidang Peternakan
- Kepala Bidang Penyuluhan
- Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
- V. Sekretariat : Analis Perencanaan Anggaran

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG**



Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19700121 200003 2 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR : 188.4 / 1869 /Distan/2025
TANGGAL : 2 Juni 2025
TENTANG : RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN
2025 DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BANDUNG

**TUGAS POKOK TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN RENCANA
KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG**

I. PENGARAH

Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025.

II. KETUA

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025;
2. Memfasilitasi kebutuhan Anggota dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025;
3. Mengendalikan proses penyusunan;
4. Melaporkan kepada Pimpinan.

III. SEKRETARIS

1. Menyusun jadwal pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025;
2. Memfasilitasi kebutuhan tim dalam proses Penyusunan;
3. Koordinasi antara sub unit kerja dan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025;
4. Menyusun konsep laporan .

IV. ANGGOTA

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sesuai lingkup kerjanya dalam penyusunan Renja;
2. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Renja;
3. Memberi masukan terkait teknis dalam setiap proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025.

V. KESEKRETARIATAN

1. Menyiapkan bahan dasar Penyusunan;
2. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas;
3. Memberikan pelayanan teknis administrasi.

4. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris;
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG**



Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19700121 200003 2 004

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian
Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

SOREANG, Juni 2025
 KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN BANDUNG

Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700121 200003 2 004

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. Renja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan pertanian, serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sampai sisa Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan sektor Pertanian. Renja SKPD ini hasil revisi dari Rancangan Renja yang memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2025 dan penutup serta lampiran. Penyusunannya didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
2. Data Statistik Pertanian Kabupaten Bandung.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2025 Semester I (sampai dengan Maret 2025).

Semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan pertanian dalam menunjang pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Soreang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BANDUNG



Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19700121 200003 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.2.1. Produktivitas pertanian.....	22
2.2.2. Nilai AKIP.....	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025	74
3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84
3.3.2 Program-Program Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	122
BAB V PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel E.81.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	8
Tabel T-C.30.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	21
Tabel 2.1.3 Pertumbuhan produktivitas padi Tahun 2023 terhadap Tahun 2024	22
Tabel 2.1.4 Performa produktivitas bulan Januari – Mei 2025	23
Tabel 2.2.5 Performa Produksi Pertanian dan Peternakan Tahun 2025	25
Tabel 2.3.6 Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP Tahun 2024 terhadap standar per komponen penilaian	27
Tabel 2.3.7 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pertanian	34
Tabel 2.4.8 Kriteria Teknis Kegiatan Musrenbang Tahun 2025	61
TABEL T-C.32.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	63
Tabel 3.1.10 Keterkaitan Visi RPJPD, RPJMD, dan RPJMD Visi RPJP	68
Tabel 3.2.11 Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJPN dan RPJPD RPJP	69
Tabel 3.3.12 Tujuan dan indikator Sasaran IKU pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025	73
Tabel 3.4.13 Visi RPJPD, RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat	74
Tabel 3.4.14 Tabel Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Program- Kegiatan Sesuai Perbup BSO Dinas Pertanian Tahun 2025	88
Tabel 3.5.15 Format Perubahan Renja Dinas Pertanian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025	101

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan tahapan perbaikan terhadap Renja Dinas Pertanian 2025. Berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja SKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan bagian integral dari Perubahan RKPD Kabupaten Bandung 2025, dilakukan sebagai perbaikan terhadap perkembangan selama tahun berjalan, perubahan tersebut dikarenakan terdapat perbaikan terhadap:

1. kerangka ekonomi dan keuangan pada dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Pertanian;
2. pergeseran dan refocusing anggaran sesuai prioritas pembangunan Daerah;
3. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan lingkup Dinas Pertanian; dan
4. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 penjabaran dari Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan tersebut meliputi Refocusing program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kebijakan pemerintah daerah yang belum terakomodir dalam dokumen Renja Dinas Pertanian Tahun 2025. Perubahan juga dilakukan terhadap indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 diterbitkan sebagai perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 juga diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pembangunan Nasional melalui Bappenas dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah ditempuh melalui mekanisme perencanaan secara elektronik.

Perubahan Renja juga diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pembangunan Nasional melalui Bappenas dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah ditempuh melalui mekanisme perencanaan secara elektronik.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025 mempertimbangkan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016-2036;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas;
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah penajaman-penajaman terhadap kinerja dan pagu indikatif program kegiatan pada Renja agar perencanaan pelaksanaan pembangunan Urusan Pertanian lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025:

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah Tahun pertama (RPJMD 2021-2026).

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya pembangunan pertanian dengan target dan sasaran yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya serta proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan

Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Diuraikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya; dan Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah- kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Program kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan I. Evaluasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 baik yang bersumber dari APBD, beserta Perubahan APBD (APBD Parsial). Pada periode sampai dengan Triwulan I pelaksanaan program kegiatan terdapat tambahan anggaran yang berasal dari berbagai sumberdana, yaitu APBN-DAK Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan, DBH-CHT.

Program Kegiatan Tahun 2025 berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2018, terdapat perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan Program Kegiatan, dimana nomenklatur terkecil berupa sub kegiatan. Hasil evaluasi capaian Program Kegiatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pertanian, sebagaimana disajikan dalam Tabel E.81 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel E.81.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.01	1. Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Poin	85,00	84,00	84,00	84,55	100,65%	84,50	0,00	168,55	198,29%
3.27.01	1. Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,00	82,00	0,00	0,00	0,00%	87,00	0,00	82,00	93,18%
3.27.01.2.01	2. Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun	dokumen	69	30	13	14	107,69%	13	4	48	69,57%
3.27.01.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12	14	4	4	100,00%	4	1	19	158,33%
3.27.01.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%
3.27.01.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%
3.27.01.2.01.0004	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%
3.27.01.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.01.2.01.0006	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	18	6	6	100,00%	6	3	27	150,00%
3.27.01.2.01.0008	3. Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	0	0	0	0,00%	1	0	0	0,00%
3.27.01.2.01.0009	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	20	0	0	0	0,00%	10	10	10	50,00%
3.27.01.2.02	2. Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas	bulan	60	36	12	12	100,00%	12	3	51	85,00%
3.27.01.2.02.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	570	2.321	2.736	2.445	89,36%	190	610	5.376	943,16%
3.27.01.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00%	1	0	0	0,00%
3.27.01.2.02.0005	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%
3.27.01.2.02.0007	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	51	51	17	17	100,00%	17	4	72	141,18%
3.27.01.2.03	2. Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian	bulan	12	0	0	0	0,00%	12	3	3	25,00%
3.27.01.2.03.0006	3. Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0,00%	1	0	0	0,00%
3.27.01.2.05	2. Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas	bulan	60	36	12	12	100,00%	12	3	51	85,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.01.2.05.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	0,00%	1	0	0	0,00%
3.27.01.2.05.0003	3. Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	36	12	12	12	100,00%	12	3	27	75,00%
3.27.01.2.05.0005	3. Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	36	12	12	12	100,00%	12	3	27	75,00%
3.27.01.2.05.0010	3. Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	0	0	0	0,00%	30	30	30	50,00%
3.27.01.2.06	2. Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas	bulan	60	24	12	12	100,00%	12	3	39	65,00%
3.27.01.2.06.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	13	1	1	100,00%	6	0	14	466,67%
3.27.01.2.06.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	33	1	1	100,00%	1	1	35	1166,67%
3.27.01.2.06.0003	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	7	1	1	100,00%	1	0	8	266,67%
3.27.01.2.06.0004	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	1	1	100,00%	1	0	4	133,33%
3.27.01.2.06.0005	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00%	29	0	2	66,67%
3.27.01.2.06.0006	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	0	2	66,67%
3.27.01.2.06.0009	3. Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	43	25	25	100,00%	70	6	74	35,24%
3.27.01.2.07	2. Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan	jenis	10	7	2	2	100,00%	2	0	9	90,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.01.2.07.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	15	24	24	100,00%	1	0	39	1950,00%
3.27.01.2.07.0005	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	100	2	2	100,00%	2	0	102	1700,00%
3.27.01.2.07.0011	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	2	2	2	100,00%	2	0	4	66,67%
3.27.01.2.08	2. Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas	bulan	60	24	12	12	100,00%	12	3	39	65,00%
3.27.01.2.08.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	1	12	12	100,00%	1	0	13	36,11%
3.27.01.2.08.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00%	12	3	27	75,00%
3.27.01.2.08.0004	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00%	12	3	27	75,00%
3.27.01.2.09	2. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah dipelihara	bulan	60	12	12	12	100,00%	12	3	27	45,00%
3.27.01.2.09.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	108	110	105	95,45%	15	3	216	480,00%
3.27.01.2.09.0006	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	2	2	2	100,00%	2	1	5	83,33%
3.27.01.2.09.0009	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	0	0	0,00%	1	0	3	150,00%
3.27.01.2.09.0011	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	27	0	4	4	100,00%	9	0	4	14,81%
3.27.01.2.11	2. Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Jumlah bulan administrasi keuangan dan operasional	bulan	12	0	12	12	100,00%	12	3	15	125,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kepala daerah dan wakil kepala daerah										
3.27.01.2.11.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	orang/bulan	24	0	24	24	100,00%	24	2	26	108,33%
3.27.02	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi komoditi sub sektor peternakan	ekor	35.513.102	20.753.020	7.100.000	7.127.164	100,38%	7.135.500	0	27.880.184	78,51%
3.27.02	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	ton	6.478.643	4.118.370	1.187.554	1.355.640	114,15%	1.240.089	336.371	5.810.381	89,69%
3.27.02.2.01	2. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	%	30,02	27,23	6,00	7,43	123,83%	6,00	0,00	34,66	115,46%
3.27.02.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi (UPTD ALSINTAN)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	36	2	12	12	100,00%	12	3	17	47,22%
3.27.02.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	36	2	12	12	100,00%	12	3	17	47,22%
3.27.02.2.01.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	24	0	0	0	0,00%	12	3	3	12,50%
3.27.02.2.01.0014	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	24	0	0	0	0,00%	12	3	3	12,50%
3.27.02.2.01.0016	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan	24	0	0	0	0,00%	12	3	3	12,50%
3.27.02.2.02	2. Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan	komoditi	16	7	3	3	100,00%	3	0	10	62,50%
3.27.02.2.02	2. Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	Ha	3.860	45	1.020	1.100	107,84%	1.020	0	1.145	29,66%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
		Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											
3.27.02.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	36	1	12	12	100,00%	12	3	16	44,44%
3.27.02.2.02.0004	3. Sub Kegiatan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3	1	1	1	100,00%	1	0	2	66,67%
3.27.02.2.05	2. Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%	9,50	9,62	3,50	3,69	105,43%	1,50	0,00	13,31	140,11%
3.27.02.2.05.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	laporan	36	1	12	12	100,00%	12	3	16	44,44%
3.27.02.2.05.0007	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	24	0	12	12	100,00%	12	3	15	62,50%
3.27.02.2.05.0008	3. Sub Kegiatan	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Laporan	90	40	20	24	120,00%	25	4	68	75,56%
3.27.02.2.05.0009	3. Sub Kegiatan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Laporan	36	0	12	12	100,00%	12	3	15	41,67%
3.27.02.2.06	2. Kegiatan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00%
3.27.02.2.06.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	20	0	0	0	0,00%	50	0	0	0,00%
3.27.02.2.06.0003	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	20	0	0	0	0,00%	630	0	0	0,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.03	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	%	75,00	16,66	15,00	15,00	100,00%	15,00	0,00	31,66	42,21%
3.27.03	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	%	8,80	24,10	9,50	10,26	108,00%	0,90	0,00	34,36	390,45%
3.27.03.2.01	2. Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian	Dokumen	39	22	13	10	76,92%	4	0	32	82,05%
3.27.03.2.01	2. Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	%	100,00	100,00	77,00	100,00	129,87%	100,00	0,00	100,00	100,00%
3.27.03.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	6	2	2	2	100,00%	2	0	4	66,67%
3.27.03.2.01.0017	3. Sub Kegiatan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	6	0	2	2	100,00%	2	0	2	33,33%
3.27.03.2.02	2. Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara	Unit	15	10	7	3	42,86%	7	0	13	86,67%
3.27.03.2.02	2. Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	Ha	8.059	7.201	2.950	2.950	100,00%	280	0	10.151	125,96%
3.27.03.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	45	25	35	140,00%	1	0	80	2666,67%
3.27.03.2.02.0009	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	9	43	22	18	81,82%	4	0	61	677,78%
3.27.03.2.02.0010	3. Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Unit	12	63	31	42	135,48%	46	0	105	875,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.03.2.02.0015	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	6	7	2	2	100,00%	2	0	9	150,00%
3.27.04	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase status kesehatan hewan ternak	%	367,66	232,96	74,00	84,37	114,01%	74,00	0,00	317,33	86,31%
3.27.04	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	%	425,80	282,14	0,00	0,00	0,00%	85,20	0,00	282,14	66,26%
3.27.04.2.01	2. Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani	PMHS	20	18	4	6	150,00%	4	3	27	135,00%
3.27.04.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	36	1	1	1	100,00%	12	3	5	13,89%
3.27.04.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	3	0	1	1	100,00%	1	0	1	33,33%
3.27.04.2.01.0008	3. Sub Kegiatan	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	0	1	1	100,00%	12	3	4	133,33%
3.27.04.2.02	2. Kegiatan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	ekor	51.000	84.212	10.200	13.940	136,67%	10.200	5.516	103.668	203,27%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.04.2.02.0004	3. Sub Kegiatan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	3	0	1	1	100,00%	12	3	4	133,33%
3.27.04.2.02.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM	laporan	3	0	1	1	100,00%	12	3	4	133,33%
3.27.04.2.03	2. Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	Kecamatan	155	93	31	31	100,00%	31	0	124	80,00%
3.27.04.2.03.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	3	2	12	12	100,00%	12	3	17	566,67%
3.27.04.2.04	2. Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	lokasi	40	16	8	11	137,50%	8	6	33	82,50%
3.27.04.2.04.0002	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	36	1	1	1	100,00%	12	3	5	13,89%
3.27.04.2.04.0004	3. Sub Kegiatan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	0	2	66,67%
3.27.04.2.04.0005	3. Sub Kegiatan	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	3	0	1	1	100,00%	1	0	1	33,33%
3.27.04.2.04.0010	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	3	0	1	1	100,00%	1	0	1	33,33%
3.27.05	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan	%	7,97	4,39	0,13	0,13	100,00%	0,18	0,00	4,52	56,71%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	ditanggulangi dampak perubahan lingkungan										
3.27.05.2.01	2. Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	Ha	1.660	911	38	38	100,00%	50	1	950	57,23%
3.27.05.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	130	6	35	35	100,00%	40	0	41	31,54%
3.27.05.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	15	175	2	2	100,00%	5	1	178	1186,67%
3.27.05.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	11	1	1	1	100,00%	5	0	2	18,18%
3.27.06	1. Program	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	%	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	101,00	101,00%
3.27.06.2.01	2. Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	Pelaku usaha	50	20	10	10	100,00%	10	0	30	60,00%
3.27.06.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	30	1	10	10	100,00%	10	0	11	36,67%
3.27.06.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	6	1	2	2	100,00%	2	0	3	50,00%
3.27.07	1. Program	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	%	38,90	32,37	4,85	28,83	594,43%	11,16	0,00	61,20	157,33%
3.27.07.2.01	2. Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan penyuluhan pertanian	kecamatan	155	62	31	31	100,00%	31	0	93	60,00%

Kode	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11)	(12)	(13) = (7)+(9)+(12)	(14) = (13) / (12)
3.27.07.2.01	2. Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	kecamatan	124	0	31	31	100,00%	31	0	31	25,00%
3.27.07.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	93	31	31	31	100,00%	31	31	93	100,00%
3.27.07.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	150	1.258	50	50	100,00%	50	0	1.308	872,00%
3.27.07.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	90	27	30	30	100,00%	30	0	57	63,33%
3.27.07.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	9	3	3	3	100,00%	3	0	6	66,67%

Berdasarkan tabel E.81 di atas, Tahun 2025 dilaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Wajib SKPD. Pada Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan 9 program pilihan pertanian guna menunjang capaian indikator Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, sedangkan Urusan Wajib SKPD berisikan program kegiatan lingkup kesekretariatan.

Tingkat realisasi capaian indicator program kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Urusan Pilihan Pertanian beragam. Umumnya capaian indicator program dapat dihitung di akhir tahun anggaran. Namun demikian terdapat beberapa indicator program yang telah diketahui sampai dengan Triwulan I, yaitu indicator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Produksi komoditi sub sector pertanian (tanaman, pangan, hortikultura, perkebunan) sebesar 336,371 ton. Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP Target nilai AKIP pada renja tahun 2025 sebesar 84,50.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu pendekatan untuk mengevaluasi kinerja suatu perangkat daerah atau unit kerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan dianalisis kinerja pelayanan diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perkembangan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung khususnya di bidang perekonomian diantaranya dapat dilihat melalui perkembangan indikator-indikator yang mengusungnya, seperti kontribusinya dalam pembentukan PDRB, LPE, kesempatan kerja dan perdagangan, disamping itu perkembangan sektor pertanian juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

Arah pembangunan Kabupaten Bandung menekankan pada eksistensi Kabupaten Bandung pada tingkat regional, nasional bahkan global dengan memperhatikan pembangunan desa, pemerintahan yang baik dan berlandaskan pada basis agama, kebudayaan tradisional, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sebagaimana Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintah lingkup Dinas Pertanian berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Urusan Pilihan Pertanian dengan Indikator outcome sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tabel TC-28 Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 meliputi yang telah ditetapkan meliputi:

1. Produktivitas pertanian.
2. Nilai AKIP.

Tabel T-C.30.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-1)	(n) (sd Trw II)	(n)	(n+1)	
1	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)		√	6,483	6,504	6,573	6,585	6,395	6,399	6,491	6,526	
2	Nilai AKIP		√	82	82,3	82,8	83,3	84	84,55	82,8	84,5	Capaian sudah melebihi target renstra

2.2.1. Produktivitas pertanian

Berdasarkan Tabel 2.1.3 tentang Pertumbuhan Produktivitas Padi Tahun 2023 terhadap Tahun 2024, terlihat adanya penurunan pada hampir seluruh indikator utama produksi padi. Luas tanam padi mengalami penurunan sebesar 8,38%, dari 87.345 hektar pada tahun 2023 menjadi 80.018 hektar pada tahun 2024. Penurunan luas tanam ini diikuti oleh penurunan luas panen sebesar 8,12%, dari 87.145 hektar menjadi 80.063 hektar. Penurunan pada dua indikator awal ini kemungkinan besar menjadi penyebab utama turunnya volume produksi padi secara keseluruhan. Produksi padi turun sebesar 8,26%, dari 557.334 ton pada tahun 2023 menjadi 511.291,77 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan produksi tidak hanya disebabkan oleh penurunan luas tanam dan panen, tetapi juga kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti cuaca, serangan hama, atau efisiensi penggunaan input produksi. Namun, jika dilihat dari sisi produktivitas per hektar, penurunannya relatif kecil, hanya sebesar 0,14%. Produktivitas padi pada tahun 2023 adalah 63,95 kwintal per hektar, sementara pada tahun 2024 menjadi 63,86 kwintal per hektar. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi produksi per satuan luas lahan masih relatif stabil, meskipun secara keseluruhan produksi menurun. Secara umum, data ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup serius dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi padi. Penurunan luas tanam dan panen yang signifikan perlu ditelusuri penyebabnya lebih lanjut agar dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali kinerja subsektor padi pada sisa tahun anggaran.

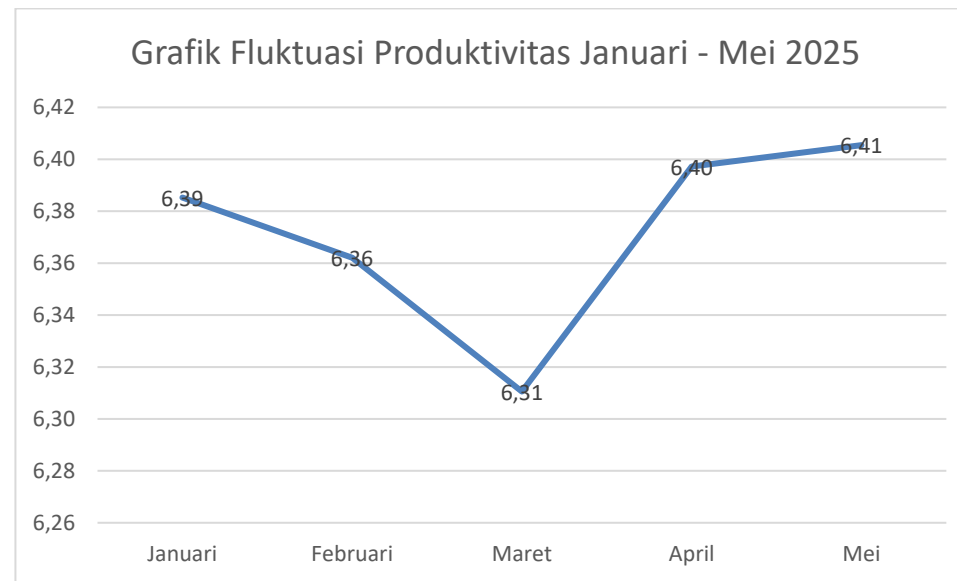
Tabel 2.1.3 Pertumbuhan produktivitas padi Tahun 2023 terhadap Tahun 2024

Uraian Komoditi	2023	2024	Pertumbuhan 2023-2024 (%)
Padi			
Luas Tanam (Ha)	87,345	80,018	-8.38%
Luas panen (Ha)	87,145	80,063	-8.12%
Produksi (Ton)	557,334	511,291.77	-8.26%
Produktivitas (Kwt/ha)	63.95	63.86	-0.14%

Performa produktivitas budidaya padi selama periode Januari-April 2025 berfluktuasi.

Tabel 2.1.4 Performa produktivitas bulan Januari – Mei 2025

Nama Tanaman	Satuan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		TOTAL	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
Padi	Ton/Ha	4.052	25.873	4.405	28.025	5.689	35.901	11.135	71.233	7.387	47.317	32.668	208.349
Total Padi	Ton/Ha	4.052	25.873	4.405	28.025	5.689	35.901	11.135	71.233	7.387	47.317	32.668	208.349



Berdasarkan Tabel 2.2.5, total realisasi produksi seluruh komoditi pertanian hingga bulan Mei 2025 mencapai 592.275 ton atau setara dengan 43,18% dari target tahunan sebesar 1.371.691,11 ton. Jika dirinci menurut subsektor, subsektor tanaman pangan mencatatkan realisasi sebesar 283.151 ton dari target 814.162,33 ton, atau sekitar 34,79%, subsektor hortikultura mencatatkan realisasi sebesar 255.450 ton dari target 412.268,58 ton, atau sekitar 61,9%, sub sector komoditi perkebunan hasil realisasi menunjukkan 0% karena data tersedia per semester, sub sector komoditi peternakan mencatatkan realisasi sebesar 53.674 ton dari target 131.602,11 ton.

Produksi komoditi tanaman pangan mencapai 283.151 ton dari target tahunan sebesar 814.162,33 ton atau setara dengan 34,79%. Kinerja produksi terbesar berasal dari komoditas padi yang mencapai 208.349 ton atau 41,15% dari target tahunan sebesar 506.289,89 ton. Komoditas jagung menyusul dengan produksi sebesar 36.294 ton dari target 119.115,73 ton, atau sebesar 30,47%. Selanjutnya, ubi jalar mencatatkan realisasi 19.497 ton dari target 55.051,71 ton atau mencapai 35,42%. Namun demikian, ubi kayu hanya terealisasi 19.011 ton atau 14,24% dari target 133.537,08 ton, menunjukkan kinerja yang masih jauh dari harapan. Adapun komoditas kedelai belum menunjukkan realisasi produksi sama sekali, sehingga capaian hingga Mei masih 0%. Rendahnya capaian pada beberapa komoditas ini menunjukkan adanya tantangan baik dari sisi musim tanam, ketersediaan lahan, maupun faktor teknis lainnya.

Subsektor hortikultura menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibanding subsektor lainnya, dengan capaian produksi sebesar 255.450 ton dari target tahunan sebesar 412.268,58 ton atau setara dengan 61,99%. Komoditas unggulan pada subsektor ini adalah cabai merah besar/cabai keriting/cabai rawit yang justru melampaui target dengan produksi mencapai 81.175 ton atau 185,73% dari target sebesar 43.802,07 ton. Selain itu, bawang merah juga menunjukkan capaian yang tinggi yaitu 37.745 ton dari target 45.981,01 ton atau 82,09%. Komoditas lain yang menunjukkan capaian di atas 40% antara lain kubis (42,73%), kentang (45,00%), dan tomat (45,75%). Namun demikian, terdapat beberapa komoditas hortikultura dengan capaian yang masih rendah, seperti alpukat yang baru terealisasi 4.948 ton (12,53%) dari target 39.489,14 ton, jambu biji dengan capaian 2.226 ton (18,68%), serta jambu air dan stroberi dengan capaian masing-masing 16,44% dan 72,49%. Khusus untuk stroberi, capaian mendekati target yaitu 17.049 ton dari target 23.519,48 ton. Sementara itu, jeruk mencapai 18.109 ton atau 59,31% dari target 30.530,63 ton, mencerminkan tren yang cukup stabil. Secara umum, subsektor hortikultura

menunjukkan dinamika positif, terutama pada komoditas strategis yang dibutuhkan pasar.

Sub sektor perkebunan belum menunjukkan realisasi produksi pada komoditas yang dipantau, yakni kopi olahan, teh, dan tembakau. Masing-masing dari ketiga komoditas tersebut memiliki target tahunan sebesar 13.685,09 ton secara agregat, namun realisasi sub sector perkebunan tersedia per semester pada tahun berjalan sehingga tercatat masih 0%.

Sub sektor peternakan, realisasi produksi sampai dengan Mei 2025 mencapai 53.674 ton dari target tahunan sebesar 131.602,11 ton atau sebesar 40,79%. Komoditas daging menunjukkan kontribusi sebesar 21.432,60 ton dari target 47.763 ton (44,87%), diikuti oleh susu yang mencapai 28.176,54 ton dari target 77.379,11 ton (36,41%), serta telur sebesar 4.065,26 ton dari target 6.460 ton (62,93%). Capaian komoditas telur menunjukkan kinerja yang cukup baik dan hampir mendekati dua pertiga dari target tahunan hanya dalam waktu lima bulan. Sementara itu, produksi daging dan susu masih berada di kisaran 35-45%, mencerminkan perlunya akselerasi produksi untuk memenuhi target hingga akhir tahun.

Secara lengkap performa kinerja seluruh komoditi pertanian berdasarkan sub sektor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.5 Performa Produksi Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

No	Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Mei 2025	Capaian (%)
Jumlah Produksi Komoditi Pertanian		1.371.691,11	592.275	43,18%
Produksi Komoditi Tanaman Pangan		814.162,33	283.151	34,7%
1	Padi	506.289,89	208.349	41,15%
2	Jagung	119.115,73	36.294	30,47%
3	Ubi Kayu	133.537,08	19.011	14,24%
4	Ubi Jalar	55.051,71	19.497	35,42%
5	Kedelai	167,92	-	0%
Produksi Komoditi Hortikultura		412.268,58	255.450	61,9%
7	Bawang Merah	45.981,01	37.745	82,09%
8	Bawang Daun	-	-	
9	Kentang	56.175,89	25.281	45,00%
10	Tomat	89.706,57	41.037	45,75%
11	Kubis	61.359,02	26.217	42,73%
12	Cabai Merah Besar/ Cabai Keriting, Cabai Rawit	43.802,07	81.175	185,32%
13	Jeruk	30.530,63	18.109	59,31%
14	Alpukat	39.489,14	4.948	12,53%
15	Jambu Biji	11.918,9	2.226	18,68%
16	Stroberi	23.519,48	17.049	72,49%
17	Jambu Air	9.785,87	1.664	17,00%
Produksi Komoditi Perkebunan		13.658,09	0	0%
18	Kopi (Olahan)	8.307	-	0%
19	Teh	3.887,9	-	0%
20	Tembakau	1.463,19	-	0%

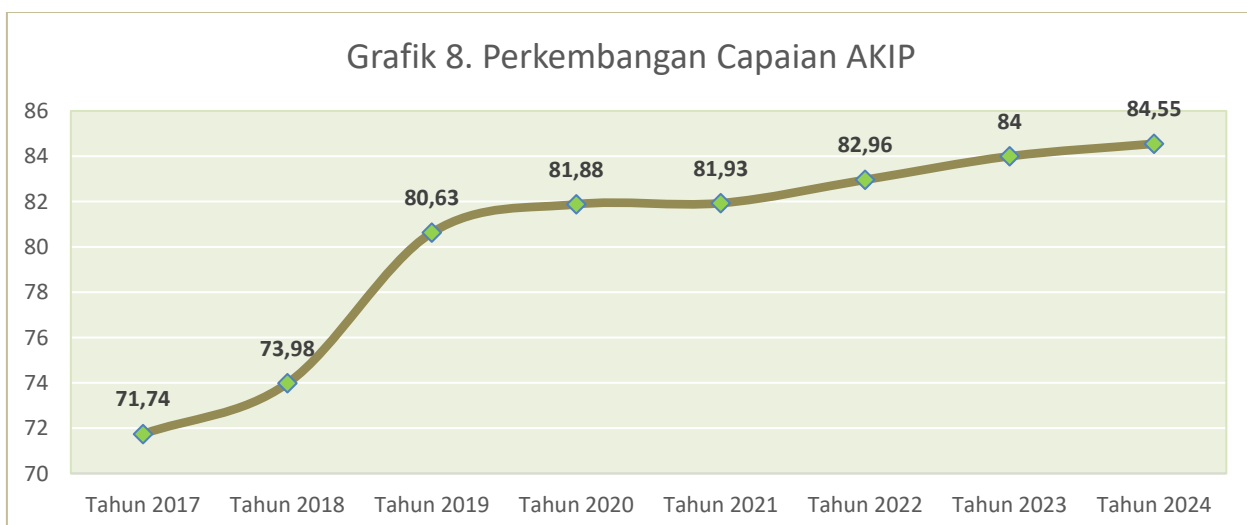
No	Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Mei 2025	Capaian (%)
Produksi Komoditi Peternakan		131.602,11	53.674	40,79%
23	Daging	47.763	21.432,60	44,87%
24	Susu	77.379,11	28.176,54	36,41%
25	Telur	6.460	4.065,26	62,93%

2.2.2. Nilai AKIP

Penilaian AKIP Dinas Pertanian Tahun 2025 belum dilakukan, sesuai jadwal dari Inspektorat akan dilaksanakan pada periode Juli-Agustus 2025. Sebagai gambaran Nilai AKIP diperoleh dari Nilai yang diperoleh dari LHE Inspektorat terhadap capaian AKIP Dinas Pertanian. Tahun 2024 nilai AKIP Dinas Pertanian dapat mencapai 84,55 (A), kategori A terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator, sebagaimana Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 mengalami peningkatan yang landai dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perbaikan pada komponen manajemen kinerja yang dievaluasi masih terbatas. Pada Tahun 2018 peningkatan dari Tahun 2017 sebesar 3,12%, pada Tahun 2019 meningkat sebesar 8,99% dari Tahun 2018, pada Tahun 2020 meningkat sebesar 1,55%, pada Tahun 2021 meningkat sebesar 0,06%, Tahun 2022 meningkat sebesar 1,24%, Tahun 2023 meningkat sebesar 1,25% dan Tahun 2024 meningkat sebesar 0,65%. Secara keseluruhan dari Tahun 2017 sejak berdirinya Dinas Pertanian terdapat pertumbuhan nilai AKIP sebesar 12,81 point atau 17,85%.

Secara sederhana perkembangan capaian AKIP Dinas Pertanian dalam periode Tahun 2017-2024 disajikan dalam grafik berikut.



Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis Dinas Pertanian. Adapun realisasi capaian AKIP pada Tahun 2024 sebesar 84,55 point telah mencapai 100,89% dari target kondisi akhir Renstra yaitu sebesar 83,8 point.

Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024 sebesar 84,55 point berada di atas rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah kabupaten. Dinas Pertanian merupakan peringkat ke-8 Perangkat Daerah yang mendapat predikat A setelah Perangkat daerah Kabupaten Bandung

Tabel 2.3.6 Perbandingan realisasi kinerja Nilai AKIP Tahun 2024 terhadap standar per komponen penilaian.

Komponen Penilaian	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Nilai Distan	27	25,5	12,3	19,75	84,55
Standar	30	30	15	25	100
Persentase %	90,00	85,00	82,00	79	84,55

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian tertinggi diperoleh dari komponen penilaian Perencanaan Kinerja sebesar 90%, sedangkan tingkat capaian terendah pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 79.

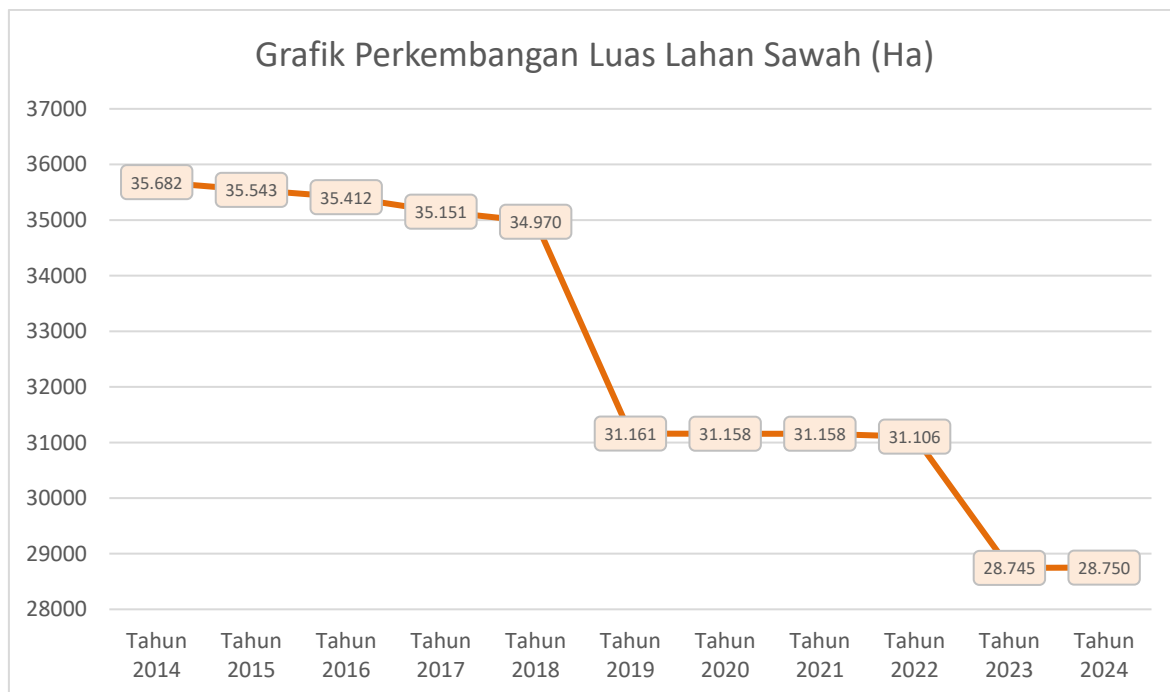
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung, kondisi Kabupaten Bandung yang ada saat ini dinilai masih belum dapat memenuhi ketahanan dan kemandirian pangan. Hal ini dilihat dari beberapa faktor, yakni ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesejahteraan pangan. Pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah upaya pemenuhan ketersediaan pangan asal produk pertanian yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses kebutuhan produk pertanian sekaligus dapat meningkatkan perekonomian petani. Terminologi pembangunan pertanian memiliki dimensi yang sangat luas. Pembangunan pertanian dapat diterjemahkan sebagai; (1) peningkatan produksi pertanian; (2) pengembangan ekonomi wilayah perdesaan; dan juga (3) pengelolaan dan konservasi sumberdaya.

Lahan, merupakan isu sentral yang mengemuka di dalam pembangunan sektor pertanian pada saat ini. Pada satu sisi, ketersediaan lahan sebagai input terpenting di dalam produksi pertanian merupakan jaminan atas

keberlangsungan produksi dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, lahan (dan pemanfaatannya) merupakan sumber utama munculnya beragam permasalahan dalam perekonomian. Tingginya laju pertumbuhan populasi penduduk Kabupaten Bandung telah menciptakan tekanan dan kompetisi yang sangat ketat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan lahan. Kondisi ini berimplikasi kepada rendahnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian Kabupaten Bandung. Ketersediaan lahan pertanian (lahan basah) di dalam RTRW Kabupaten Bandung diproyeksikan menurun sebesar 62,85% pada Tahun 2026.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas lahan sawah mengalami penurunan signifikan sebesar 6.932 Ha, dari 35.682 Ha pada tahun 2014 menjadi hanya 28.750 Ha pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tekanan alih fungsi lahan yang tinggi dan menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan serta optimalisasi lahan pertanian di masa mendatang. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan luas lahan sawah dapat dilihat pada grafik berikut.



Lahan sawah memiliki fungsi strategis dalam ketahanan pangan karena merupakan sumber utama produksi beras sebagai pangan pokok masyarakat. Selain menjamin ketersediaan pangan, sawah juga menopang akses pangan melalui penyediaan lapangan kerja dan penghasilan bagi petani, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem pangan lokal. Fungsi ekologisnya sawah berperan sebagai penyerap air, pengatur iklim mikro, dan penyangga lingkungan, meningkatkan perlindungan sawah merupakan salah satu upaya untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan. Oleh karena itu,

perlindungan lahan sawah tidak hanya penting secara ekonomis, tetapi juga sebagai instrumen kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pada tahun 2024, total potensi lahan sawah di Kabupaten Bandung mencapai 28.748 hektar, yang terdiri atas 20.611 hektar sawah irigasi dan 8.136 hektar sawah tadah hujan. Sebaran lahan sawah ini mencerminkan kondisi geografis dan sistem pengairan yang bervariasi di tiap kecamatan. Kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar adalah Rancaekek dengan total 3.051,96 hektar, terdiri atas 1.592,59 hektar sawah irigasi dan 1.459,37 hektar sawah tadah hujan. Disusul oleh Ciparay (2.542,07 ha), Solokan Jeruk (1.632,63 ha), dan Pacet (1.460,48 ha), yang masing-masing juga memiliki proporsi cukup besar terhadap total luas lahan sawah di kabupaten ini.

Semakin berkurangnya luas lahan baku sawah produktif merupakan tekanan paling besar pada jumlah produksi pangan terutama padi, disisi lain pertumbuhan penduduk menuntut adanya peningkatan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan. Tingginya tekanan eksternal tersebut diperlukan adanya kebijakan, regulasi dan pengawasan yang tegas dalam melindungi lahan-lahan produktif dari alih fungsi ke sektor non pertanian. Dengan kata lain pemerintah dituntut berupaya untuk menjaga ketersediaan lahan budidaya berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bagian Kelima terkait Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Pada satu sisi, terbatasnya lahan yang dimiliki menyebabkan kecilnya peluang bagi pelaku usahatani untuk melakukan ekspansi produksi karena memang pada teknologi yang sedang berlaku terdapat perbandingan lurus antara luas lahan dengan tingkat produksi. Implikasinya adalah petani cenderung untuk mengeksploitasi lahan yang terbatas tersebut untuk memaksimalkan produksi pertanian per satuan luas. Pada sisi lain produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas usaha budidaya.

Keterbatasan petani dalam memperoleh sarana budidaya yang memadai dan terjangkau merupakan tantangan signifikan yang menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu kendala utama adalah tingginya harga sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian modern. Petani kecil dan menengah seringkali memiliki daya beli yang kurang untuk memperoleh sarana tersebut dalam jumlah yang memadai. Akibatnya, mereka harus menggunakan benih lokal yang kurang produktif, pupuk dan pestisida dalam jumlah terbatas, serta alat pertanian tradisional yang kurang efisien, sehingga produktivitas pertanian menjadi rendah dan hasil panen tidak optimal.

Selain itu, distribusi sarana budidaya seringkali tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai membuat biaya distribusi meningkat, sehingga harga sarana budidaya di daerah-daerah tersebut menjadi lebih mahal. Petani juga menghadapi masalah dalam mengakses informasi tentang teknologi pertanian terbaru dan praktik budidaya yang lebih efisien. Keterbatasan akses informasi ini membuat mereka sulit untuk mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi dari pemerintah dan sektor swasta untuk memperbaiki distribusi sarana budidaya, menyediakan insentif dan bantuan sarana produksi serta alat mesin pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi selain peningkatan infrastruktur pertanian.

Permasalahan terbatasnya ketersediaan air pada saat kemarau dan overirigasi pada saat penghujan merupakan tantangan signifikan bagi produktivitas budidaya pertanian, terutama dalam proses produksi padi sawah. Saat kemarau, sumber air seperti sungai, danau, dan waduk mengalami penurunan drastis, sehingga pasokan air untuk irigasi menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan tanaman tidak mendapatkan air yang cukup untuk tumbuh optimal, sehingga berbanding lurus pada penurunan hasil panen, baik pada komoditi tanaman pangan terutama juga pada komoditi hortikultura yang umumnya sentra produksi pada dataran tinggi seperti di kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Kutawaringin, Pangalengan, Cimaung, Arjasari, Pacet, Ibum, Cikancung, Nagreg, Cimenyan dan Cilengkrang. Selain itu, kekeringan ekstrim dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan tanah, membuat kondisi pertanian semakin sulit.

Sebaliknya, overirigasi yang terjadi saat musim penghujan membawa dampak yang tidak kalah merugikan. Kelebihan air di lahan pertanian dapat menyebabkan erosi tanah, menghilangkan lapisan subur tanah (leaching), dan merusak sistem perakaran tanaman. Kondisi ini membuat tanaman sulit untuk menyerap nutrisi dengan efisien, mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Selain itu, genangan air pada sawah-sawah produktif dapat menjadi sarang penyakit tanaman dan hama, memperparah kondisi lahan dan menurunkan produktivitas. Dengan demikian, baik kekurangan maupun kelebihan air menjadi faktor kritis yang perlu dikelola dengan bijak untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan budidaya pertanian. Dengan kata lain pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menunjang kebutuhan ketersediaan air di sepanjang tahun perlu mendapat perhatian lebih. Kondisi ketersediaan air di sentra produksi padi terutama pada lahan sawah yang

dilindungi masih belum merata terpeuhi sepanjang tahun. Masih banyak saluran tersier yang perlu penanganan serius, seperti rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan sumur-sumur dangkal/dalam serta dam parit dan perbaikan pintu-pintu air agar distribusi air lebih optimal. Dalam pemenuhan kebutuhan air khususnya pada pembangunan irigasi pada sawah irigasi teknis tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian, perlu dilakukan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan Lembaga lain sesuai kewenangannya. Pada saluran primer bagaimana BBWS dapat mengelola sungai utama atau anak sungan lingkup DAS, serta DPUTR dalam perbaikan dan pembangunan irigasi lingkup saluran sekunder, agar air dapat mengalir baik ke saluran tersier yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian.

Pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan kelompok tani yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Banyak petani masih mengandalkan metode budidaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, yang seringkali tidak lagi efektif dalam menghadapi tantangan pertanian modern seperti perubahan iklim, hama dan penyakit, serta penurunan kesuburan tanah. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan formal dalam bidang pertanian membuat petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknologi baru, praktik budidaya yang lebih efisien, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta ketergantungan pada input pertanian yang tidak ramah lingkungan.

Selain itu, kelompok tani sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas petani juga seringkali kurang efektif karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan organisasi. Banyak kelompok tani yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga sulit untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, hal ini dapat dilihat bahwa 65,8% kelompok tani terdaftar dalam simluhtan merupakan kelas pemula. Minimnya pengetahuan tentang akses pasar, teknik pemasaran, dan manajemen keuangan juga membuat kelompok tani kesulitan untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM petani dan kelompok tani melalui program pelatihan yang komprehensif, penyuluhan berkelanjutan, serta akses terhadap sumber daya informasi dan teknologi pertanian yang modern.

Jaminan pemasaran, pasca panen, dan pengolahan (nilai tambah) produk pertanian merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani

dan keberlanjutan sektor pertanian. Jaminan pemasaran adalah mekanisme yang menjamin petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang wajar dan stabil. Tanpa jaminan pemasaran, petani seringkali menghadapi ketidakpastian harga dan kesulitan dalam menjual produk mereka, terutama ketika ada kelebihan pasokan. Program-program seperti kontrak pertanian, koperasi, dan dukungan dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat membantu memastikan petani memiliki akses ke pasar yang lebih luas dan stabil. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko penurunan harga yang drastis, tetapi juga memberi kepastian pendapatan bagi petani, sehingga mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen.

Pasca panen adalah tahap kritis yang sering kali menentukan keberhasilan dari seluruh proses budidaya. Penanganan pasca panen yang buruk, seperti penyimpanan yang tidak memadai, transportasi yang tidak efisien, dan kurangnya fasilitas pengeringan atau pendinginan, dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas produk. Hal ini berakibat pada kerugian yang signifikan bagi petani, karena hasil panen tidak dapat dijual dengan harga optimal. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pasca panen, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pengolahan, dan sistem transportasi yang efisien, sangat penting untuk menjaga kualitas produk pertanian dan mengurangi kerugian pasca panen. Selain itu, fluktuasi harga pasar produk pertanian yang tinggi serta kurangnya akses petani terhadap pasar yang lebih menguntungkan merupakan salah satu hambatan dalam memperoleh nilai tukar produk yang lebih baik.

Penanganan pasca panen yang baik dan pengolahan produk pertanian merupakan langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Dengan mengolah hasil panen menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, petani dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjualnya dalam bentuk mentah. Pengolahan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri terkait. Selain itu, produk olahan memiliki masa simpan yang lebih lama, sehingga dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas dan tidak tergantung pada musim panen. Untuk mendukung pengolahan produk pertanian, diperlukan akses ke teknologi dan peralatan pengolahan yang modern, pelatihan bagi petani dan pelaku usaha kecil, serta dukungan kebijakan yang mendorong investasi di sektor pengolahan pertanian.

Meskipun pada beberapa komoditas pertanian menunjukkan kualitas produk yang sudah baik dan memiliki keunikan tersendiri yang membedakan produk Kabupaten Bandung dengan produk daerah lain baik nasional maupun

internasional. Maka dari itu diperlukan peningkatan produktivitas dan daya saing produk unggulan dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Bandung.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peran strategis bagi Dinas Pertanian dalam menyusun rencana kerja tahunan yang relevan, terarah, dan berbasis kebutuhan. Melalui proses review ini, Dinas Pertanian dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMD, serta mendukung pencapaian target nasional dan provinsi di sektor pertanian. Review ini juga memungkinkan identifikasi terhadap isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, produktivitas lahan, kesejahteraan petani, dan pengendalian penyakit hewan, yang memerlukan intervensi nyata melalui program yang tepat sasaran. Dengan menganalisis kebutuhan berdasarkan data statistik sektoral, kondisi wilayah, dan aspirasi petani, Dinas Pertanian dapat menyusun kegiatan yang responsif dan memiliki dampak langsung di lapangan. Selain itu, review juga membantu menghindari tumpang tindih kegiatan antar bidang atau UPTD, serta memperkuat argumentasi teknis dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, review terhadap Ranwal RKPD menjadi langkah awal penting untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan Dinas Pertanian disusun secara akuntabel, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor pertanian.

Tabel 2.3.7 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Bandung Dinas Pertanian

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
					DINAS PERTANIAN				108.382.713.281	DINAS PERTANIAN				133.755.685.232	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				104.240.913.281	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				129.235.569.989	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				104.240.913.281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				129.235.569.989	
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	83,3 Poin	46.467.992.865	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	84,5 Poin	49.918.090.930	
3	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun	13 Dokumen	426.189.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun	13 Dokumen	271.109.302	
3	2	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	121.545.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	94.158.802	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.121.000	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.120.000	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.240.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.121.000	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.120.000	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	94.684.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	17.501.800	
3	2	0	2.0	000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	60.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	9.196.900	

Kode Rekening						Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	97.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	123.769.800		
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas	12 Bulan	39.631.202.642	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas	12 Bulan	41.602.322.077		
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	39.606.902.642	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2419 Orang/Bulan	41.586.938.277		
3	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.144.000		
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000		

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	10.239.800	
3	2	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12 Bulan	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12 Bulan	29.495.000	
3	2	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.495.000	
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas	12 Bulan	338.005.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas	12 Bulan	294.096.494	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.800.000	
3	2	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.505.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.250.000	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	27.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	9.046.494	
3	2	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	
3	2	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	200.000.000	
3	2	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas	12 Bulan	764.280.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas	12 Bulan	971.691.650	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	314.780.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	724.351.000	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	75.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	75.182.450	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	42.803.000	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	101.350.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.675.200	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	3.146.000	
3	2	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	-	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
3	2	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	179.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	55.534.000	
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan	2 Jenis	304.358.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan	2 Jenis	367.466.900	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	96.592.000	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Alat Besar	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Alat Besar	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	105.000.000	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	183.579.900	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	162.820.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	87.295.000	
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas	12 Bulan	4.220.529.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas	12 Bulan	5.580.412.644	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	480.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	733.241.892	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.738.589.040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.844.170.752	
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas	12 Bulan	722.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas	12 Bulan	755.967.680	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	-	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	340.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	189 Unit	232.660.680	
3	2	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	29.320.000	
3	2	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	312.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	493.987.000	
3	2	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	45.529.183	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	45.529.183	
3	2	0	2.1	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	45.529.183	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	45.529.183	
3	2	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah Populasi Ternak Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	7135500 Ekor 1370089 Ton	6.824.673.667	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah Populasi Ternak Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	7140000 Ekor 1182897 ton	19.779.490.230	
3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	6 %	2.078.101.817	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	6 %	5.958.500.225	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2.084.458.475	
3	2	0	2.0	000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	1.357.367.817	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	3.064.244.550	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	12 Laporan	190.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	12 Laporan	271.236.000	
3	2	0	2.0	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0 Laporan	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	12 Laporan	347.554.000	
3	2	0	2.0	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	12 Laporan	315.734.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0 Laporan	-	
3	2	0	2.0	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	12 Laporan	215.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	12 Laporan	191.007.200	
3	2	0	2.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	3 komoditi 1020 Ha	2.464.489.450	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	3 komoditi 1020 Ha	8.956.745.078	
3	2	0	2.0	000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	2.464.489.450	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	8.956.745.078	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						an, Semua Kel/Desa					an, Semua Kel/Desa				
3	2	0	2.0		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	1.5 %	1.597.708.800	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	2.27 %	1.684.626.977	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	893.958.800	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	896.416.077	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	12 Laporan	61.210.750	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12 Laporan	223.750.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	12 Laporan	-	
3	2	0	2.0	000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	12 Laporan	480.000.000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	12 Laporan	727.000.150	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
3	2	0	2.0		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 %	684.373.600	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 %	3.179.617.950	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 Ton	250.000.000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50 Ton	181.497.950	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	10 Ekor	434.373.600	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	732 Ekor	2.998.120.000	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	15 % 0.9 %	11.893.195.560	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	15 % 0.9 %	13.303.460.549	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0		Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	13 Dokumen 100 %	902.594.960	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	4 Dokumen 100 %	1.122.732.304	
3	2	0	2.0	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	90.224.354	
3	2	0	2.0	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2 Dokumen	827.594.960	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	2 Dokumen	1.032.507.950	
3	2	0	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	7 Unit 280 Ha	10.990.600.600	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	3 Unit 280 Ha	12.180.728.245	
3	2	0	2.0	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.244.740.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	3.162.919.600	
3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	
3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	
3	2	0	2.0	000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	600.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	695.514.200	
3	2	0	2.0	001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	9.145.860.600	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit	8.322.294.445	Terdapat program strategis Bupati Bandung peningkatan ketersediaan air pada lahan LSD

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	2.010.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	1.344.900.125	
3	2	0	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani	4 PHMS	1.140.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani	4 PHMS	742.430.075	
3	2	0	2.0	000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	450.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	417.816.375	
3	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	450.000.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	147.751.950	
3	2	0	2.0	000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	240.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	176.861.750	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	10200 ekor	360.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	10200 ekor	215.993.200	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	360.000.000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	215.993.200	
3	2	0	2.0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	8 Lokasi	510.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	8 Lokasi	386.476.850	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	200.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	150.239.400	
3	2	0	2.0	000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	185.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	161.286.700	

Kode Rekening						Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	5	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 Unit Usaha	125.000.000	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 Unit Usaha	74.950.750	
3	2	0				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	3.2 %	879.701.189	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	3.2 %	2.953.513.950	
3	2	0	2.0			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	50 Ha	879.701.189	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	50 Ha	2.953.513.950	
3	2	0	2.0	000	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	359.701.189	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	1.216.244.150	
3	2	0	2.0	000	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	350.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	1.714.089.200	
3	2	0	2.0	000	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	170.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	23.180.600	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	100 %	380.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	100 %	371.663.340	
3	2	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	10 Pelaku Usaha	380.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	10 Pelaku Usaha	371.663.340	
3	2	0	2.0	000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	125.000.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	100.206.600	
3	2	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	255.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	271.456.740	
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	11.16 %	35.785.350.00 0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	11%	41.564.450.865	
3	2	0	2.0		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	31 Kecamatan 31 Kecamatan	35.785.350.00 0	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	31 Kecamatan 31 Kecamatan	41.564.450.865	
3	2	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Unit	260.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an,	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Unit	387.508.100	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
					Kecamatan dan Desa	Semua Kel/Desa					Kecamatan dan Desa	Semua Kel/Desa				
3	2	0	2.0	000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Unit	34.785.250.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1370 Unit	40.349.758.865	Terdapat program strategis Bupati Bandung berupa Kartutani Sivedas dan BPJS bagi petani	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	400.100.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	158.715.700		
3	2	0	2.0	000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	340.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	119.762.200		
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang/Bulan	0	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	113 Orang	548.706.000		
					UPTD ALAT MESIN PERTANIAN				525.000.000	UPTD ALAT MESIN PERTANIAN				401.077.300		

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					525.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				401.077.300	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					525.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				401.077.300	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak	1370089 Ton 7135500 Ekor		525.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak	1370089 Ton 7135500 Ekor	401.077.300	
3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	6 %		525.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	6 %	401.077.300	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	525.000.000		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	401.077.300	
					UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS					700.000.000	UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS				873.299.737	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					700.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				873.299.737	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					700.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				873.299.737	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	15 % 0.9 %	475.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	15 % 0.9 %	416.699.748	
3	2	0	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara	7 Unit	475.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara	1 Unit	416.699.748	
3	2	0	2.0	001	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Bandung , Baleendah, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	475.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Bandung , Baleendah, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	416.699.748	
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	225.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	456.599.989	
3	2	0	2.0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	8 Lokasi	225.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	8 Lokasi	456.599.989	
3	2	0	2.0	001	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	225.000.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3 Unit	456.599.989	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
									490.000.000					612.352.960		
3					UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN					UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN					612.352.960	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				490.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					612.352.960	
3	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				490.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					612.352.960	
3	2	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak	1370089 Ton 7135500 Ekor	490.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak	1370089 Ton 7135500 Ekor	612.352.960		
3	2	0	2	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	3 Komoditi 1020 Ha	490.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	3 Komoditi 1020 Ha	612.352.960		
3	2	0	2	000 4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	490.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	612.352.960		
					UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN				550.000.000	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN				813.864.646		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				550.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				813.864.646		
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				550.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				813.864.646		

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	550.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	813.864.646	
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	31 Kecamatan	550.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	31 Kecamatan	813.864.646	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	550.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	813.864.646	
					UPTD PASAR HEWAN				275.000.000	UPTD PASAR HEWAN				107.038.650	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				275.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				107.038.650	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				275.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				107.038.650	
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	275.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Persentase status kesehatan hewan ternak	85.2 % 74 %	107.038.650	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	10200 Ekor	275.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	10200 Ekor	107.038.650	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	275.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	107.038.650	
					UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA				1.601.800.000	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA				1.712.481.950	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.601.800.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.712.481.950	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.601.800.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.712.481.950	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah Populasi Ternak Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	7135500 Ekor 1370089 Ton	1.601.800.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah Populasi Ternak Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	7135500 Ekor 1370089 Ton	1.712.481.950	
3	2	0	2.0		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	1.5 %	1.601.800.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	1.5 %	1.712.481.950	

Kode Rekening					Ranwal Renja Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	2	0	2.0	000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	12 Laporan	1.601.800.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	25 Laporan	1.712.481.950	
TOTAL									69.304.727.831				133.755.685.232		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu penjangkaran usulan melalui Musrenbang dan Aspirasi DPRD. Proses penjangkaran tersebut dilaksanakan melalui Aplikasi Simda Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diproses secara berjenjang dari tingkat RW, desa, kecamatan dan terakhir verifikasi kabupaten. Mekanisme Musrenbang Tahun 2025 lingkup Dinas Pertanian mengalami peningkatan kualitas, dari semula menggunakan sistem manual, usulan *Bottom up* melalui Musrenbang mengadopsi aplikasi Sistem Perencanaan yang didalamnya sudah terintegrasi antara Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Satuan Biaya (ASB). Berbagai usulan masyarakat diproses secara online mulai dari tingkat desa dan dijangkarkan pada tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) serta tahapan penyetaraan tingkat kabupaten (Forum SKPD lingkup Dinas). Masih terdapat DSP usulan kecamatan dengan pagu yang melebihi yang ditetapkan Bappeda, namun pada umumnya pagu usulan yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan sesuai dengan pagu yang ditetapkan Bapperida.

Meskipun penjangkaran usulan melalui aplikasi ini lebih akurat dan akuntabel, masih terdapat usulan-usulan yang salah persepsi dari pengusul di tingkat desa dengan maksud dari uraian pada kriteria teknis yang disampaikan kewilayah. Pengertian pengusul akan jenis barang yang ada di kriteria teknis barang yang ada di kriteria teknis beberapa masih salah pengertian. Hal tersebut diantisipasi dengan cara menolak usulan yang salah dan mengganti ke jenis usulan baru secara manual dan merupakan bagian dari Berita Acara Forum PD Dinas Pertanian.

Selain melalui mekanisme Musrenbang, usulan masyarakat juga berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Bandung melalui Aspirasi DPRD. Mekanisme ini pula diinputkan di dalam SIPD dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah dan Bappeda.

Guna menjangkarkan usulan masyarakat dalam menunjang prioritas pembangunan pertanian, diberikan batasan guna lebih menyaring usulan dan dikelompokkan sesuai potensi daerahnya masing-masing. Terdapat 33 jenis uraian kegiatan yang dapat diusulkan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.8 Kriteria Teknis Kegiatan Musrenbang Tahun 2025

Sub Kegiatan	Rincian Usulan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	fasilitasi alat penanam padi Rice Transplanter	Unit	86.500.000
	fasilitasi sarana pengolahan lahan Pertanian (Cultivator)	Unit	22.128.750
	Peningkatan Pengolahan Tanah Tanaman Pangan (fasilitasi Traktor roda 2 6,5 PK)	Unit	22.575.000
	Peningkatan Pengolahan Tanah Tanaman Pangan (fasilitasi Traktor Roda 2 8,5 PK)	Unit	31.500.000
3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Peningkatan sarana pasca panen Kopi (Pulper)	Unit	25.750.000
	Peningkatan sarana pasca panen Kopi (Huller)	Unit	25.000.000
3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Peningkatan sarana panen padi (perontok padi/power thresher)	Unit	26.780.000
	Peningkatan sarana pasca panen padi (Husker)	Unit	39.655.000
	Peningkatan sarana pasca panen padi (Polisher)	Unit	62.060.000
3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	fasilitasi pengolahan keripik kentang	Paket	23.100.000
	fasilitasi pengolahan keripik strawberry	Paket	23.250.000
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	fasilitasi Benih Bawang Merah	kg	65.000
	fasilitasi Benih Cabai Merah	Sachet	202.500
	fasilitasi Benih jagung Hibrida	kg	49.700
	fasilitasi benih jagung manis	kg	123.600
	fasilitasi Benih Jeruk Siam Madu	Pohon	56.700
	fasilitasi Benih Padi Inbrida	kg	16.800
	fasilitasi Bibit Kopi	Pohon	8.500
	fasilitasi nutrisi AB mix dan rockwool	paket	1.159.600
	fasilitasi Polybag	Kg	40.600
	fasilitasi Pupuk Hayati Cair	liter	116.400
	fasilitasi Pupuk Organik Padat	kg	4.000
	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Bibit sayuran dalam polybag)	Buah	20.600
	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Bibit tanaman obat dalam keluarga dalam polybag)	Buah	25.800
3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengembangan usaha budidaya Itik Dewasa petelur	Kelompok	15.290.500
	Pengembangan usaha budidaya Ternak Domba Garut	Kelompok	25.519.600
	Pengembangan usaha budidaya Ternak Domba Lokal	Kelompok	41.344.000
	Pengembangan usaha budidaya Ternak Domba Penggemukan	Kelompok	37.400.000
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	fasilitasi alat handsprayer	Unit	1.071.200
	fasilitasi alat penyiang gulma (Mesin rumput)	Unit	7.530.600
	Fasilitias alat power sprayer	Unit	3.906.900

Sub Kegiatan	Rincian Usulan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	fasilitasi Pompa Air 15 PK, 6 Inch, Bahan Bakar Solar	Unit	34.875.800
	fasilitasi Pompa air 3" bahan bakar bensin	Unit	9.177.300

Usulan program kegiatan yang berasal dari hasil proses musrenbang Tahun 2025 dari total 1065 usulan terdapat 441 usulan yang diterima dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.350.024.550,-. Sedangkan dari usulan Aspirasi DPRD dari 240 usulan, yang diterima dan masuk kedalam Renja sebanyak 168 usulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.379.812.550,-. Seiring dengan besarnya refocusing anggaran dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, berdampak pada struktur anggaran yang berasal dari usulan masyarakat, terutama dari yang bersumber dari Musrenbang. Proses refocusing dilakukan pada periode bulan Maret 2025, sehingga pada aktivitas kegiatan musrenbang yang belum diproses pendokumentasian dan pelaksanaan akan mengalami pengurangan. Pada Perubahan RKPD dinamika kegiatan usulan masyarakat dapat digambarkan secara umum dalam tabel berikut.

TABEL T-C.32.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung
Dinas Pertanian

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume			Besaran/Volume			Catatan
				Renja 2025			Perubahan Renja 2025			Musrenbang / Pokir
				Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	
1	3.27.02.2.01.00 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Fasilitasi sarana pengolahan lahan Pertanian (Cultivator)	Arjasari, Banjaran, Cileunyi, Cimenyan, Ciwidey, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali	25	Unit	553.218.750			0	Musrenbang
				5	Unit	110.643.750	5	Unit	110.643.750	Pokir
		Peningkatan Pengolahan Tanah Tanaman Pangan (fasilitasi Traktor roda 2 6,5 PK)	Arjasari, Banjaran, Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Ciparay, Ciwidey, Ibum, Nagreg, Paseh	11	Unit	248.325.000			0	Musrenbang
				3	Unit	67.725.000	3	Unit	67.725.000	Pokir
		Peningkatan Pengolahan Tanah Tanaman Pangan (fasilitasi Traktor Roda 2 8,5 PK)	Cangkuang, Cileunyi, Cimaung, Ciparay, Ibum, Kutawaringin, Majalaya, Margaasih, Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang	26	Unit	819.000.000	26	Unit	819.000.000	Musrenbang
	4		Unit	126.000.000	4	Unit	126.000.000	Pokir		
2	3.27.02.2.01.00 06 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Peningkatan sarana pasca panen Kopi (Huller)	Cilengkrang, Kutawaringin, Pacet	2	Unit	50.000.000	2	Unit	50.000.000	Musrenbang
				1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	Pokir
		Peningkatan sarana pasca panen Kopi (Pulper)	Cilengkrang	1	Unit	25.750.000	1	Unit	25.750.000	Musrenbang
3				7	Unit	187.460.000			0	Musrenbang

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume			Besaran/Volume			Catatan
				Renja 2025			Perubahan Renja 2025			Musrenbang / Pokir
				Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	
	3.27.02.2.01.00 14 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Peningkatan sarana panen padi (perontok padi/power thresher)	Cangkuang, Cimaung, Ciparay, Katapang, Majalaya, Solokanjeruk	2	Unit	53.560.000	2	Unit	53.560.000	Pokir
		Peningkatan sarana pasca panen padi (Husker)	Ciparay	3	Unit	118.965.000			0	Musrenbang
		Peningkatan sarana pasca panen padi (Polisher)	Majalaya, Solokanjeruk	1	Unit	39.655.000	1	Unit	39.655.000	Pokir
				2	Unit	124.120.000	1	Unit	62.300.000	Musrenbang
4	3.27.02.2.01.00 16 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	fasilitasi pengolahan keripik kentang	Kertasari	1	Paket	23.100.000	1	Paket	23.100.000	Musrenbang
		fasilitasi pengolahan keripik strawberry	Rancabali	1	Paket	23.250.000	1	Paket	23.250.000	Musrenbang
5	3.27.02.2.02.00 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	fasilitasi Benih Bawang Merah	Cimenyan, Ciwidey, Pangalengan, Rancabali, Soreang	3451	Kg	289.250.000	4.450	Kg	289.250.000	Musrenbang
				285	Kg	18.525.000	285	Kg	18.525.000	Pokir
		fasilitasi Benih Cabai Merah	Cikancung, Cimenyan, Ciwidey, Ibum, Kertasari, Kutawaringin, Pangalengan, Rancabali, Soreang	674	Sachet	136.485.000	674	Sachet	136.485.000	Musrenbang
		fasilitasi Benih jagung Hibrida	Cikancung, Cileunyi, Nagreg	720	Kg	35.784.000			0	Musrenbang
	fasilitasi benih jagung manis	Banjaran, Paseh, Pasirjambu	275	Kg	33.990.000			0	Musrenbang	

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume			Besaran/Volume			Catatan
				Renja 2025			Perubahan Renja 2025			Musrenbang / Pokir
				Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	
		fasilitasi Benih Jeruk Siam Madu	Pasirjambu, Soreang	400	Pohon	22.680.000	400	Pohon	22.680.000	Musrenbang
		fasilitasi Benih Padi Inbrida	Banjaran, Bojongsoang, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Ibum, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Soreang	18681	Kg	313.840.800	12.407	Kg	208.437.600	Musrenbang
		fasilitasi Bibit Kopi	Arjasari, Banjaran, Cicalengka, Cikancung, Kertasari, Kutawaringin, Nagreg, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali	41505	Pohon	395.250.000	46.500	Pohon	395.250.000	Musrenbang
		fasilitasi nutrisi AB mix dan rockwoll	Bojongsoang, Ibum	7	paket	8.117.200	7	paket	8.117.200	Musrenbang
		fasilitasi Polybag	Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Nagreg, Pameungpeuk	470	Kg	19.082.000	0		0	Musrenbang
		fasilitasi Pupuk Hayati Cair	Arjasari, Bojongsoang, Cangkuang, Cileunyi, Cimenyan, Ciparay, Kutawaringin, Paseh, Pasirjambu, Rancabali	945	liter	109.998.000	0		0	Musrenbang
				220		25.608.000	220	liter	25.608.000	Pokir
		fasilitasi Pupuk Organik Padat	Bojongsoang, Cangkuang, Ciwidey, Ibum, Katapang, Kutawaringin, Pacet, Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali	24000	kg	96.000.000	0		0	Musrenbang
				10880		43.520.000	10880	kg	43.520.000	Pokir
				2555	Buah	52.633.000	2555	Buah	52.633.000	Musrenbang

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume			Besaran/Volume			Catatan
				Renja 2025			Perubahan Renja 2025			Musrenbang / Pokir
				Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	
		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Bibit sayuran dalam polybag)	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cikancung, Cilengkrang, Ibum, Margaasih, Nagreg, Paseh, Pasirjambu	700		14.420.000	700	Buah	14.420.000	Pokir
		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Bibit tanaman obat dalam keluarga dalam polybag)	Banjaran, Cicalengka, Cimaung, Cimenyan, Ibum, Katapang, Pasirjambu	2650	Buah	68.370.000	2650	Buah	68.370.000	Musrenbang
6	3.27.02.2.05.00 06 Pengawasan Produksi Bibit/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengembangan usaha budidaya Itik Dewasa petelur	Banjaran, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Katapang, Majalaya, Nagreg, Pameungpeuk, Pangalengan, Rancaekek, Solokanjeruk, Soreang	9	Kelompok	137.614.500	9	kelompok	137.614.500	Musrenbang
				8		8	kelompok	122.324.000	Pokir	
7	3.27.02.2.06.00 03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengembangan usaha budidaya Ternak Domba Garut	Bojongsoang, Cangkuang, Cimaung, Ciparay, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibum, Katapang, Majalaya, Margaasih, Pacet, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali	18	Kelompok	459.352.800	18	kelompok	459.352.800	Musrenbang
				10		10	kelompok	255.196.000	Pokir	
		Pengembangan usaha budidaya Ternak Domba Lokal	Baleendah, Cicalengka, Ciwidey, Kertasari, Kutawaringin, Majalaya, Nagreg, Pacet, Pangalengan, Pasirjambu, Soreang	10	Kelompok	413.440.000	10	kelompok	413.440.000	Musrenbang
				5		5	kelompok	206.720.000	Pokir	
Pengembangan usaha budidaya		6	Kelompok	224.400.000	6	Kelompok	224.400.000	Musrenbang		

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume			Besaran/Volume			Catatan
				Renja 2025			Perubahan Renja 2025			Musrenbang / Pokir
				Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	Volume	Satuan	Pagu (Rp.)	
		Ternak Domba Penggemukan	Cicalengka, Ciparay, Ibum, Kertasari, Margahayu, Pasirjambu, Soreang	3		112.200.000	3	Kelompok	112.200.000	Pokir
8	3.27.05.2.01.00 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	fasilitasi alat handsprayer	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Cimenyan, Ibum, Katapang, Margaasih, Nagreg, Pacet, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu	247	Unit	264.586.400	247	Unit	264.586.400	Musrenbang
				16		17.139.200	16	Unit	17.139.200	Pokir
		fasilitasi alat penyiang gulma (Mesin rumput)	Arjasari, Banjaran, Cangkuang, Cilengkrang, Cimaung, Ciwidey, Ibum, Kutawaringin, Nagreg, Pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali	81	Unit	609.978.600	81	Unit	609.978.600	Musrenbang
				7		52.714.200	7	Unit	52.714.200	Pokir
		Fasilitias alat power sprayer	Arjasari, Ciwidey, Pangalengan, Soreang	6	Unit	23.441.400	6	Unit	23.441.400	Musrenbang
				11		42.975.900	11	Unit	42.975.900	Pokir
9	3.27.05.2.01.00 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	fasilitasi Pompa Air 15 PK, 6 Inch, Bahan Bakar Solar	Baleendah, Ibum, Rancaekek	3	Unit	104.627.400	3	Unit	104.627.400	Musrenbang
		fasilitasi Pompa air 3" bahan bakar bensin	Arjasari, Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cicalengka, Cimaung, Ciwidey, Katapang, Kertasari, Majalaya, Margaasih, Pameungpeuk, Paseh, Rancabali, Rancaekek	39	Unit	357.914.700	39	Unit	357.914.700	Musrenbang
				5		45.886.500	5	Unit	45.886.500	Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 pada tahap keempat. Perumusan visi untuk RPJMD 2021-2025 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1.10 Keterkaitan Visi RPJPD, RPJMD, dan RPJMD Visi RPJP

VISI RPJPD, RPJMN, DAN RPJMD VISI RPJP	VISI RPJM	
	Nasional (Tahun 2020-2024)	Jawa Barat (Tahun 2018-2023)
Kabupaten Bandung (Tahun 2005-2025)		
Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sementara itu, prioritas pembangunan berdasarkan RPJP tahap keempat, baik secara nasional maupun daerah diarahkan pada pemantapan perekonomian dan pemerataan pembangunan. Hal ini dituangkan dalam prioritas pembangunan RPJPN Tahun 2021-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahap IV Tahun 2021-2025.

Tabel 3.2.11 Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJPN dan RPJPD RPJP

Nasional Tahap IV (Tahun 2020- 2024)	RPJP Jawa Barat Tahap IV (Tahun 2018- 2023)	RPJP Kabupaten Bandung Tahap IV (Tahun 2021- 2025)
Percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai keunggulan Masyarakat Jawa Barat di segala bidang.	Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan

Sumber: RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung

Dinas Pertanian menggaris bawahi target dalam mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dan target melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan, mencakup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan serta Bidang Sarana dan Prasarana yang didukung oleh beberapa Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan pada potensi tersebut maka diharapkan mampu mengendalikan dan mengembangkan potensi sektor pertanian dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki daya saing:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, yang mencirikan produk pertanian unggulan daerah;
2. Mampu berdaya saing secara global; dan
3. *Green Products*.

Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus didukung keberlangsungannya sebagai faktor pendorong percepatan pembangunan wilayah pedesaan dan juga merupakan sektor yang memperkuat ketahanan pangan, sebagai bahan baku pengolahan untuk agroindustri pedesaan, membuka kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan petani. Jika dilihat dari fungsi, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung.

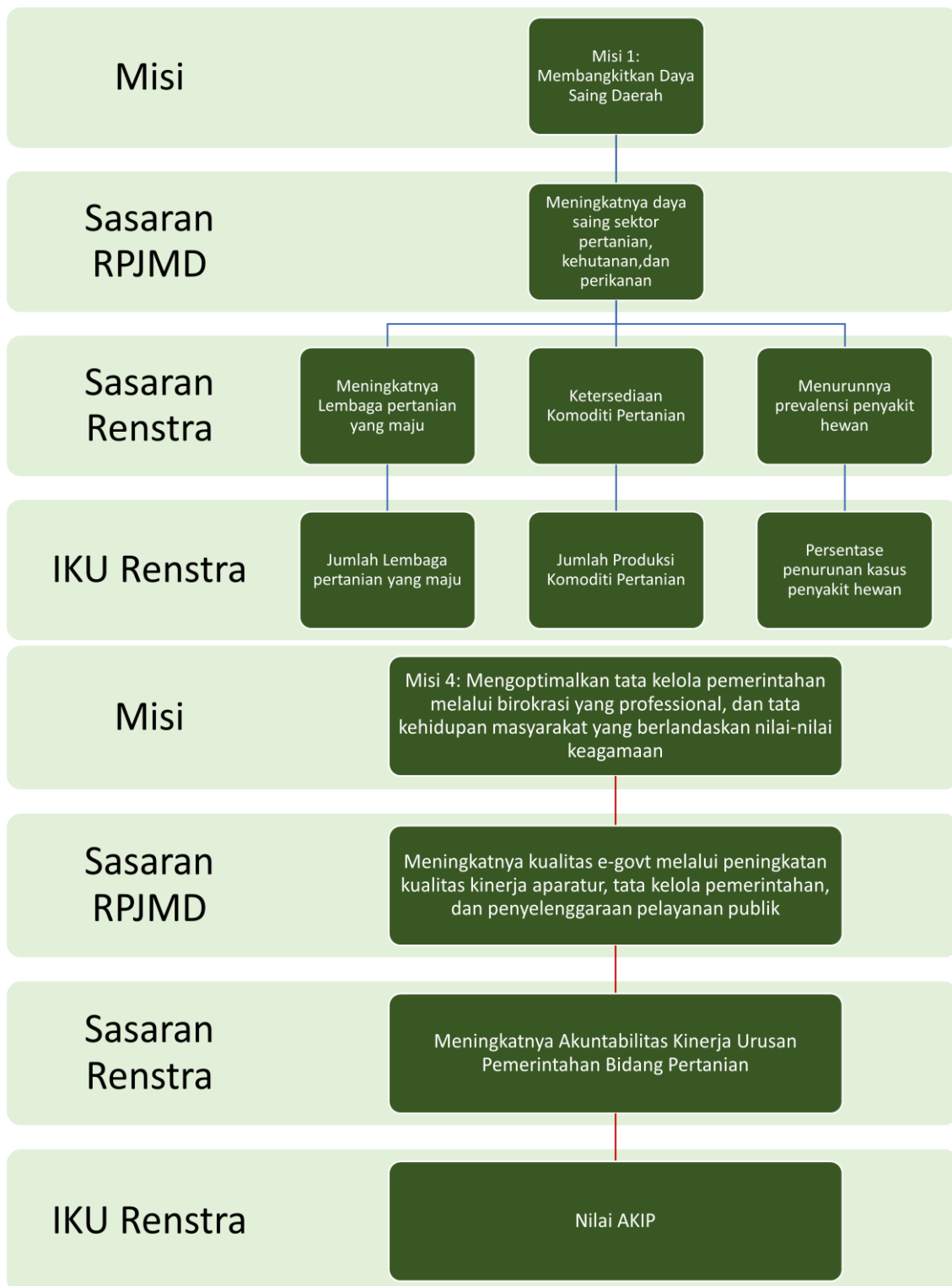
Dinas Pertanian Kabupaten Bandung merupakan Perangkat Daerah (PD) yang berperan dan berwenang dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, wewenang dan peran yang dimiliki oleh Dinas tersebut tentunya akan mengalami perubahan yang cukup signifikan mengingat bahwa pada waktu sekarang dan ke depan, tugas pokok yang diemban akan semakin berat; dimana selain harus menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor, serta juga sebagai sektor yang diharapkan menjadi motor alternatif pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karena dinamika perubahan yang harus diantisipasi dengan baik, dibutuhkan suatu perencanaan strategis dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam konteks pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung. Meskipun selama ini perencanaan pembangunan selalu menghadapi dilema antara penempatan prioritas pada pembangunan sektoral atau pembangunan wilayah, namun pada paradigma baru ini perencanaan pembangunan dapat bersifat holistik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”** melalui pelaksanaan misi ke-1 yang telah ditetapkan tersebut di atas sebagai acuan pembangunan pertanian yaitu **“Membangkitkan Daya Saing Daerah”**, diperlukan adanya kerangka yang jelas, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan baik urusan peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha pertanian maupun Urusan Pilihan Pertanian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi RPJMD menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, yang bertujuan pembangunan yang ditetapkan adalah meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam menunjang tujuan dan menjadi acuan Dinas Pertanian yaitu Meningkatkan daya saing sektor pertanian, Dinas Pertanian mendorong pencapaian target indikator sasaran tersebut melalui penetapan sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Sasaran daerah lainnya yaitu



Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian periode 2021-2026. Performa capaian sasaran Dinas Pertanian pada periode Renstra, indikator dan target-realisisasi Pelayanan Perangkat Daerah berikut Target-Realisasi pendanaannya sebagaimana tergambar dalam sub bab 2.1 dan 2.2 di atas perlu dilakukan koreksi atau revisi terhadap target beberapa indikator sasaran dan program.

Pada periode Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pertanian, yaitu:

1. Jumlah Lembaga Pertanian yang Maju.
2. Jumlah Produksi Komoditi Pertanian.
3. Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan.
4. Nilai AKIP.

Pada Tabel 3.3, Tujuan dan indikator sasaran IKU pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian secara umum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Terdapat dua tujuan utama, yaitu penguatan simpul pangan dan kawasan pertanian tangguh, serta peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi.

Pada tujuan pertama, indikator peningkatan produktivitas pertanian menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Jumlah lembaga pertanian yang maju mencapai 95% dari target akhir renstra, sedangkan produksi komoditas pertanian telah terealisasi sebesar 20%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, realisasi ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah berjalan pada arah yang benar. Sementara itu, indikator penurunan prevalensi penyakit hewan menunjukkan capaian luar biasa, yaitu 51,19% dari target 20%, atau setara dengan 256% dari target renstra.

Untuk tujuan kedua, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi, terlihat dari nilai AKIP yang sangat baik. Realisasi tahun ini berada pada angka 84,55 dari target renstra sebesar 83,8, atau setara dengan 101%. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 84,55, dan telah dicapai dengan persentase sebesar 100,8%, menunjukkan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian memiliki capaian kinerja yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan agar mencapai target 100% pada akhir periode renstra. Peningkatan efektivitas program dan penguatan sinergi lintas sektor dapat menjadi strategi yang penting untuk memastikan keberhasilan seluruh indikator sasaran di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.3.12 Tujuan dan indikator Sasaran IKU pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	TARGET TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI TAHUN S/D TAHUN SEKARANG	CAPAIAN S/D TAHUN SEKARANG	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025		PERSEN THD TARGET RENSTRA
			RENJA	PERUBAHAN RENJA						RENJA	PERUBAHAN RENJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12	13=12/8
1	Penguatan simpul pangan dan kawasan pertanian tangguh bencana yang menerapkan konsep keberlanjutan dan sirkular	Persentase peningkatan Produktivitas Pertanian/ Meningkatnya Produktivitas Pertanian	8,87%	8,87%	Meningkatnya Lembaga pertanian yang maju	Jumlah Lembaga pertanian yang maju (Kelompok)	120	114	95%	115	115	100%
					Ketersediaan Komoditi Pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (Ton)	7.363.934,92	1.486.750,00	20%	1.496.340,69	1.305.240,06	17,72%
					Menurunnya prevalensi penyakit hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)	20%	51,19%	256%	20%	20%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Nilai AKIP	83,3	84,55	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	Nilai AKIP (point)	83,8	84,55	101%	83,3	84,5	100,8%

*) Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tahun 2025

Selain itu, sebagai informasi tambahan bahwa tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029. Dengan adanya peralihan tersebut, Dinas Pertanian tetap mendukung rencana pembangunan daerah Kabupaten Bandung di bidang pertanian. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran terbaru Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

a) Telaahan Visi Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 3.4.13 Visi RPJPD, RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat

RPJP Nasional (Tahun 2025-2045)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045)	RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-2045)
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju dan berkelanjutan	Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia	Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan

Untuk merealisasikan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, telah dirumuskan delapan misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Transformasi tata kelola;
4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif;
8. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung juga mempertimbangkan Arah Kebijakan RPJP, dengan keterkaitan sebagai berikut:

RPJP Nasional (Tahun 2025-2045)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045)	RPJPD Kabupaten Bandung (Tahun 2025-2045)
<u>Tahap I (2025-2029)</u> Penguatan Transformasi	<u>Tahap I (2025-2029)</u> Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola	<u>Tahap I (2025-2029)</u> Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pembangunan Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak Misi ini

berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius.

Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang

memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparat pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa

ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi tersebut, pelaksanaan pelayanan (Tupoksi) Dinas Pertanian menunjang Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian Misi ke-2 Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Sektor pertanian merupakan pilar utama penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari usaha tani. Melalui pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, Dinas Pertanian mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, pertanian juga memainkan peran krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan lokal yang cukup, aman, dan bergizi menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pertanian mengembangkan berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi, meminimalkan risiko gangguan pasokan melalui sistem pertanian yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sektor pertanian bukan hanya menjadi tolok ukur kemajuan subsektor tertentu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

b) Tujuan dan Sasaran PD

- Tujuan dan Sasaran menunjang Misi 2

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi ke-2 yang telah ditetapkan tersebut di atas sebagai acuan pembangunan pertanian yaitu diperlukan adanya kerangka yang jelas, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan baik urusan peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha pertanian maupun Urusan Pilihan Pertanian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi 2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	
Tujuan PD	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	
Indikator Tujuan	Nilai Tukar Petani (N T P)	
Sasaran PD	Meningkatnya Produktifitas Petani	
Indikator Sasaran	Laju Pertumbuhan Produktifitas Petani	
Program Prioritas PD	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

Dalam rangka mendukung Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan”, Dinas Pertanian membangun struktur pohon kinerja yang menggambarkan keterkaitan logis antara Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas. Pohon kinerja ini menjadi alat untuk memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan dan

program dapat menjawab tantangan nyata yang dihadapi petani dan sektor pertanian secara keseluruhan.

Secara umum, petani di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan struktural dalam peningkatan kesejahteraan. Ketergantungan pada usaha tani skala kecil, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, teknologi, pembiayaan, dan pasar menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani belum optimal. Berdasarkan data Nilai Tukar Petani (NTP), posisi daya beli petani cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal untuk menunjang kehidupan yang layak. Selain itu, fenomena alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta volatilitas harga komoditas semakin menekan margin usaha tani, terutama di subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

Menanggapi kondisi tersebut, Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Petani”. Tujuan ini menjadi representasi dari tekad Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pengungkit utama kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan. Untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan tersebut digunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan daya beli dan posisi relatif petani dalam kegiatan ekonomi.

Pada Sasaran Perangkat Daerah, dirumuskan sasaran “Meningkatnya Produktivitas Petani” sebagai penanda keberhasilan antara yang lebih operasional. Sasaran ini dimaknai sebagai peningkatan rata-rata pendapatan petani setiap tahunnya. Dengan indikator Laju Pertumbuhan Produktivitas Petani, arah pembangunan pertanian lebih fokus pada nilai ekonomi dan bukan hanya volume produksi.

Selanjutnya, Program Prioritas Perangkat Daerah diarahkan pada penguatan ekosistem usaha tani, melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas SDM pertanian, fasilitasi akses teknologi dan informasi, serta pembentukan jejaring agribisnis yang mendukung efisiensi dan stabilitas harga. Program-program ini juga diarahkan untuk mengembangkan ketahanan pangan berbasis lokal melalui peningkatan diversifikasi produksi, kemandirian benih, dan penguatan kelembagaan petani.

Melalui arah pembangunan ini, diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kualitas hidup petani. Kesejahteraan petani diharapkan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kapasitas, keberlanjutan usaha, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Nilai Tukar Petani diharapkan meningkat secara stabil di atas angka 100, sebagai indikasi meningkatnya daya beli dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani. Pendapatan rata-rata petani juga ditargetkan meningkat secara bertahap, dengan basis usaha tani yang lebih modern, berorientasi pasar, namun tetap berbasis lokal dan ramah lingkungan.

- Tujuan dan Sasaran menunjang Misi 3

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi ke-3 yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 3 sebagai berikut::

Tujuan Pembangunan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah dengan indicator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi General.

Misi 3	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
Tujuan PD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Tujuan	
Sasaran PD	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Reformasi Birokrasi General
Program Prioritas PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rumusan tujuan diatas menerjemahkan tujuan pembangunan yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang baik mencerminkan sistem pemerintahan pada Dinas Pertanian mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan layanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini dirumuskan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah. Birokrasi yang berkualitas ditandai dengan pelayanan publik yang mudah diakses, prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit, serta penggunaan anggaran dan sumber daya yang tepat sasaran. Transparansi dalam birokrasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pemerintahan, sementara akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Efektivitas berarti kebijakan dan program pemerintah mampu mencapai hasil yang diinginkan, dan efisiensi menunjukkan bahwa proses pencapaian tersebut dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Dengan peningkatan kualitas birokrasi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh, pelayanan publik menjadi lebih baik, dan seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara lebih adil, cepat, dan berkelanjutan.

Tata kelola internal Perangkat Daerah diwujudkan dengan pengukuran indikator sasaran berupa Indeks Reformasi Birokrasi General. Indeks Reformasi Birokrasi General merupakan ukuran capaian upaya pembenahan birokrasi secara menyeluruh di suatu instansi, termasuk Dinas Pertanian. Indeks ini mencerminkan sejauh mana Dinas Pertanian telah melaksanakan prinsip

birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, melalui aspek manajemen perubahan, tata laksana, kelembagaan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian termasuk kedalam urusan pemerintahan bidang pertanian yang terbagi kedalam 6 program. Sebagaimana hasil analisis terhadap Rancangan Renja Tahun 2025, terdapat pergeseran pagu sub kegiatan, baik lintas program, maupun di dalam pagu kegiatan. Selain itu terdapat tambahan anggaran dari mekanisme usulan Pokir maupun sektoral dengan sub kegiatan dan indicator output yang disesuaikan. Adapun tambahan pagu anggaran yang berasal dari hasil Musrenbang dan Pokir, diuraikan dalam Lampiran. Berikut ini merupakan penjelasan kegiatan dan sub kegiatan pada program tersebut.

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program yang berkaitan dengan Urusan Penunjang ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran, fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prima lingkup sekretariat. Program Penunjang tersebut membutuhkan anggaran indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 49.918.090.930,-.

Adapun rencana program penunjang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun Anggaran 2025 sebanyak 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (8 sub kegiatan)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4 sub Kegiatan)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 sub Kegiatan)

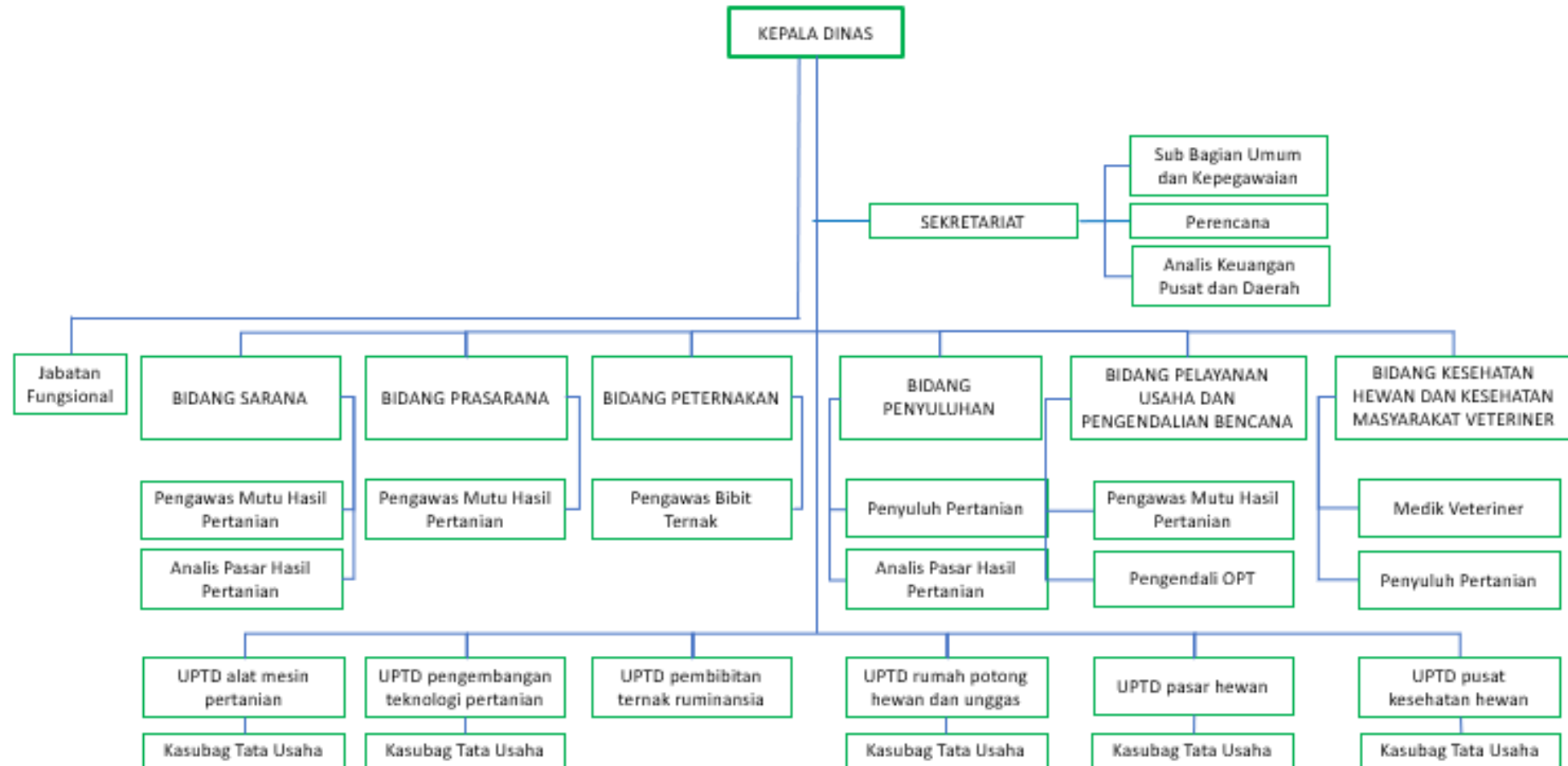
- d. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sub kegiatan yang mengakomodasi insentif Retribusi Daerah)
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4 sub kegiatan)
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (7 sub kegiatan)
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (3 sub Kegiatan)
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 sub kegiatan)
- i. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 sub kegiatan)

3.3.2 Program-Program Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

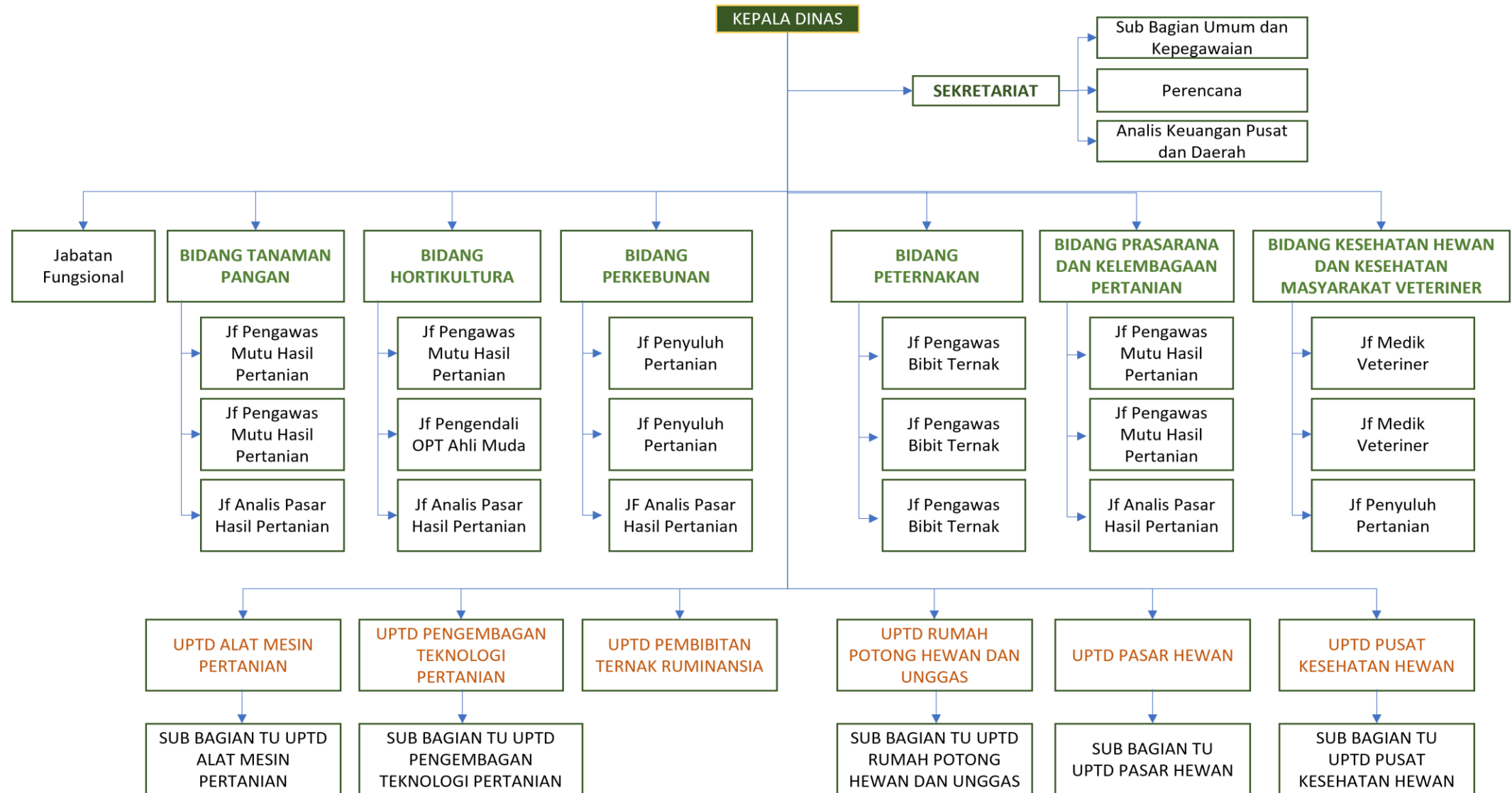
Perencanaan pelaksanaan program kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran indikatif sebesar tersebut di atas digunakan sebagai upaya untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Langkah operasional dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian. Seiring dengan proses Evaluasi terhadap Bagan Struktur Organisasi pada Dinas Pertanian, diperlukan perubahan terhadap struktur yang dapat lebih terarah dengan instansi vertical, baik lingkup Jawa Barat maupun Kementerian Pertanian.

Adapun perubahan dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung, agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dapat lebih terarah. Perubahan struktur tersebut berupa perubahan Nomenklatur Bidang yang diikuti dengan perubahan Tugas Pokok dan Fungsi dari Bidang Baru. Hal tersebut akan berdampak pada perubahan pemangku pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang berjalan di Tahun 2025. Berikut Perubahan Bagan Struktur Organisasi (BSO) Dinas Pertanian sebelum dan pasca Perbup tentang perubahan BSO Dinas Pertanian.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN SEBELUM PERUBAHAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN SETELAH PERUBAHAN



Tabel 3.4.14 Tabel Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Program-Kegiatan Sesuai Perbup BSO Dinas Pertanian Tahun 2025

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penguatan simpul pangan dan kawasan pertanian tangguh bencana yang menerapkan konsep keberlanjutan dan sirkular	Meningkatnya lembaga pertanian yang maju	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani				
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan penyuluhan pertanian			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Penyuluhan	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Penyuluhan	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Bidang Penyuluhan	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
2		Ketersediaan Komoditi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi komoditi sub sektor peternakan Produksi komoditi sub sektor				

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
				pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)				
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	UPTD Alat Mesin Pertanian	Bidang Tanaman Pangan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Sarana	UPTD Alat Mesin Pertanian
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan			
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Bidang Perkebunan
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bidang Sarana	Bidang Hortikultura
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian	UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak			

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bidang Peternakan	Bidang Peternakan
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Bidang Peternakan	Bidang Peternakan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	UPTD Pembibitan Ternak	UPTD Pembibitan Ternak
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Bidang Peternakan	Bidang Peternakan
3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian				
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian			
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		Luas lahan terdampak yang terfasilitasi			

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
					penyediaan prasarana pertanian			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
4			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju				
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	UPTD Rumah Potong Hewan	UPTD Rumah Potong Hewan
5		Menurunnya prevalensi penyakit hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase status kesehatan hewan ternak				

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani			
			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
			Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya			
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	UPTD Pasar Hewan	UPTD PASAR HEWAN
			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		Masyarakat Veteriner
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	UPTD Puskesmas	UPTD Pusat Kesehatan Hewan
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH			
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
			Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Bidang Keswan dan Kesmavet	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; UPTD Rumah Potong Hewan
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	UPTD Rumah Potong Hewan	Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
6			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan				
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Bidang PUSDALTAN	Bidang Hortikultura
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Bidang PUSDALTAN	Bidang Tanaman Pangan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bidang PUSDALTAN	Bidang Perkebunan
7			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk				

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
				memperoleh perizinan				
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian			
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Bidang PUSDALTAN	Bidang Perkebunan
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Bidang PUSDALTAN	Bidang Perkebunan
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	PROGRAM PENUNJANG KABUPATEN/KOTAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP				
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Sekretariat	Sekretariat

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas			

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat	Sekretariat
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Sekretariat	Sekretariat
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah dipelihara			

NO	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME ULTIMATE	OUTCOME INTERMEDIET	OUTPUT	Sub Unit BSO Lama	Sub Unit BSO Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat	Sekretariat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat	Sekretariat
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat	Sekretariat

Program prioritas pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian terdiri dari 6 Program yang meliputi 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan tersebut dibutuhkan pagu anggaran indikatif melalui APBD Kabupaten untuk teknokratif maupun kewilayahan sebesar Rp.83.837.594.302,00. kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (6 sub kegiatan)
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (2 sub kegiatan)
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota (4 sub kegiatan)
 - d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (2 Sub Kegiatan)
- 2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian (2 sub kegiatan)
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian (4 sub kegiatan)
- 3) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota (3 sub kegiatan)
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (2 sub kegiatan)
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (4 sub kegiatan)
- 4) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (3 sub kegiatan)
- 5) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (2 sub kegiatan)
- 6) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (5 sub kegiatan)

Adapun rincian program kegiatan sebelum dan sesudah perubahan anggaran berikut perubahan indikator dangengaggarannya disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.5.15 **Format Perubahan Renja Dinas Pertanian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025**

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.01	1. Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	84,50	84,50	Poin	46.417.992.865	49.918.090.930	3.500.098.065	APBD	APBD	85	Poin	49.652.245.710	a/b/c
3.27.01	1. Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	87,00	87,00	%	-	-	-	APBD	APBD	88,00%	%	-	a/b/c
3.27.01.2.01	2. Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	13	13	dokumen	426.189.000	271.109.302	-155.079.698	APBD	APBD	15	dokumen	843.005.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	Dokumen	121.545.000	94.158.802	-27.386.198	APBD	APBD	4	Dokumen	121.545.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	8.240.000	4.121.000	4.119.000	APBD	APBD	1	Dokumen	8.240.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.01.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	18.240.000	9.120.000	-9.120.000	APBD	APBD	1	Dokumen	18.240.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0004	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	8.240.000	4.121.000	-4.119.000	APBD	APBD	1	Dokumen	8.240.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	18.240.000	9.120.000	-9.120.000	APBD	APBD	1	Dokumen	18.240.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0006	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6	6	Laporan	94.684.000	17.501.800	-77.182.200	APBD	APBD	6	Laporan	52.200.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.01.2.01.0008	3. Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	60.000.000	9.196.900	-50.803.100	APBD	APBD	1	Dokumen	26.300.000	a/b/c
3.27.01.2.01.0009	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10	10	Data	97.000.000	123.769.800	26.769.800	APBD	APBD	10	Data	590.000.000	a/b/c
3.27.01.2.02	2. Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas	Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	39.631.202.642	41.602.322.077	1.971.119.435	APBD	APBD	12	bulan	41.631.290.710	a/b/c
3.27.01.2.02.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	190	2.419	Orang/bulan	39.606.902.642	41.586.938.277	1.980.035.635	APBD	APBD	190	Orang/bulan	41.606.990.710	a/b/c
3.27.01.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	4.300.000	2.144.000	-2.156.000	APBD	APBD	1	Dokumen	4.300.000	a/b/c
3.27.01.2.02.0005	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Laporan	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	APBD	APBD	1	Laporan	5.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg		
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Akhir Tahun SKPD																	
3.27.01.2.02.0007	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	17	17	Laporan	15.000.000	10.239.800	-4.760.200	APBD	APBD	17	Laporan	15.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.03	2. Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian	Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	15.000.000	29.495.000	14.495.000	APBD	APBD	12	bulan	25.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.03.0006	3. Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Laporan	15.000.000	29.495.000	14.495.000	APBD	APBD	1	Laporan	25.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.05	2. Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas	Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	288.005.000	294.096.494	6.091.494	APBD	APBD	12	bulan	65.500.000	a/b/c	

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.01.2.05.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Paket	100.000.000	79.800.000	-20.200.000	APBD	APBD	0	Paket	-	a/b/c
3.27.01.2.05.0003	3. Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Dokumen	10.505.000	5.250.000	-5.255.000	APBD	APBD	0	Dokumen	-	a/b/c
3.27.01.2.05.0005	3. Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Dokumen	27.500.000	9.046.494	-18.453.506	APBD	APBD	12	Dokumen	15.500.000	a/b/c
3.27.01.2.05.0010	3. Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30	306	Orang	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD	APBD	10	Orang	50.000.000	a/b/c
3.27.01.2.06	2. Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas	Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	764.280.000	971.691.650	207.411.650	APBD	APBD	12	bulan	824.280.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6	1	Paket	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	1	Paket	20.000.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	13	Paket	314.780.000	724.351.000	409.571.000	APBD	APBD	1	Paket	314.780.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0003	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	3	Paket	75.250.000	75.182.450	67.550	APBD	APBD	1	Paket	75.250.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				yang Disediakan																
3.27.01.2.06.0004	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	3	Paket	70.000.000	42.803.000	-27.197.000	APBD	APBD	1	Paket	55.000.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0005	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	29	2	Paket	101.350.000	50.675.200	-50.674.800	APBD	APBD	1	Paket	101.350.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0006	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	3.150.000	3.146.000	4.000	APBD	APBD	1	Dokumen	3.150.000	a/b/c
3.27.01.2.06.0009	3. Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	70	70	Laporan	179.750.000	55.534.000	-124.216.000	APBD	APBD	70	Laporan	254.750.000	a/b/c
3.27.01.2.07	2. Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	2	jenis	304.358.000	367.466.900	63.108.900	APBD	APBD	2	jenis	275.820.000	a/b/c
3.27.01.2.07.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	2	Unit	36.538.000	96.592.000	60.054.000	APBD	APBD	0	Unit	-	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.01.2.07.0005	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	6	Unit	105.000.000	183.579.900	78.579.900	APBD	APBD	2	Unit	113.000.000	a/b/c
3.27.01.2.07.0011	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	3	Unit	162.820.000	87.295.000	-75.525.000	APBD	APBD	2	Unit	162.820.000	a/b/c
3.27.01.2.08	2. Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	4.220.529.040	5.580.412.644	1.359.883.604	APBD	APBD	12	bulan	5.244.450.000	a/b/c
3.27.01.2.08.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Laporan	1.500.000	3.000.000	1.500.000	APBD	APBD	12	Laporan	1.500.000	a/b/c
3.27.01.2.08.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	480.440.000	733.241.892	252.801.892	APBD	APBD	12	Laporan	645.400.000	a/b/c
3.27.01.2.08.0004	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	3.738.589.040	4.844.170.752	1.105.581.712	APBD	APBD	12	Laporan	4.597.550.000	a/b/c
3.27.01.2.09	2. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah dipelihara	Jumlah bulan barang milik daerah dipelihara	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	722.900.000	755.967.680	33.067.680	APBD	APBD	12	bulan	742.900.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)				Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		a/b/c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
3.27.01.2.09.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	15	189	Unit	340.000.000	232.660.680	-107.339.320	APBD	APBD	15	Unit	240.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.09.0006	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	3	Unit	20.000.000	29.320.000	9.320.000	APBD	APBD	2	Unit	40.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.09.0009	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	3	Unit	312.900.000	493.987.000	181.087.000	APBD	APBD	1	Unit	412.900.000	a/b/c	
3.27.01.2.09.0011	3. Sub Kegiatan	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	9	1	Unit	50.000.000	-	-50.000.000	APBD	APBD	9	Unit	50.000.000	a/b/c	
3.27.01.2.11	2. Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	bulan	45.529.183	45.529.183	-	APBD	APBD	0	bulan	-	a/b/c	
3.27.01.2.11.0001	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	24	24	orang/bulan	45.529.183	45.529.183	-	APBD	APBD	0	orang/bulan	-	a/b/c	

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.02	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi komoditi sub sektor peternakan	Jumlah Populasi komoditi sub sektor peternakan	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7.135.500	7.140.000	ekor	15.652.046.467	22.505.402.440	6.853.355.973	APBD	APBD	7171177	ekor	6.664.119.000	a/b/c
3.27.02	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	Internal Dinas	Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1.240.089,00	1.182.897,00	ton	-	-	-	-	-	1263273	ton	-	a/b/c
3.27.02.2.01	2. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6,00	6,00	%	5.198.874.317	6.359.577.525	1.160.703.208	APBD	APBD	6,01%	%	1.915.822.000	a/b/c
3.27.02.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	1	Laporan	-	2.084.458.475	2.084.458.475	-	DBH-CHT	0	Laporan	-	a/b/c
3.27.02.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi (UPTD ALSINTAN)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	525.000.000	401.077.300	-123.922.700	APBD	APBD	12	Laporan	515.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.02.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	3.282.280.317	3.064.244.550	-218.035.767	APBD	APBD	12	Laporan	900.822.000	a/b/c
3.27.02.2.01.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	290.750.000	271.236.000	-19.514.000	APBD	APBD	12	Laporan	150.000.000	a/b/c
3.27.02.2.01.0014	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	839.494.000	347.554.000	-491.940.000	APBD	APBD	12	Laporan	150.000.000	a/b/c
3.27.02.2.01.0016	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	261.350.000	191.007.200	-70.342.800	APBD	APBD	12	Laporan	200.000.000	a/b/c
3.27.02.2.02	2. Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan	Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3	3	komoditi	4.638.042.450	9.569.098.038	4.931.055.588	APBD	APBD	3	komoditi	1.537.793.000	a/b/c
3.27.02.2.02	2. Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1.020,00	1.020,00	Ha	-	-	-	-	-	1020	Ha	-	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.02.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Dokumen	4.148.042.450	8.956.745.078	4.808.702.628	APBD	APBD	12	Dokumen	1.012.793.000	a/b/c
3.27.02.2.02.0004	3. Sub Kegiatan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	UPTD PTP	UPTD PTP	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	VUB	490.000.000	612.352.960	122.352.960	APBD	APBD	1	VUB	525.000.000	a/b/c
3.27.02.2.05	2. Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1,50	2,27	%	5.130.756.100	3.397.108.927	-1.733.647.173	APBD	APBD	1,50 %	%	2.310.504.000	a/b/c
3.27.02.2.05.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	laporan	2.825.206.100	896.416.077	-1.928.790.023	APBD	APBD	12	laporan	233.254.000	a/b/c
3.27.02.2.05.0007	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	223.750.000	61.210.750	-162.539.250	APBD	APBD	12	Laporan	198.750.000	a/b/c
3.27.02.2.05.0008	3. Sub Kegiatan	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia	UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25	25	Laporan	1.601.800.000	1.712.481.950	110.681.950	APBD	APBD	30	Laporan	1.323.500.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.02.2.05.0009	3. Sub Kegiatan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	480.000.000	727.000.150	247.000.150	APBD	APBD	12	Laporan	555.000.000	a/b/c
3.27.02.2.06	2. Kegiatan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100,00	100,00	%	684.373.600	3.179.617.950	2.495.244.350	APBD	APBD	100%	%	900.000.000	a/b/c
3.27.02.2.06.0002	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50,00	50,00	Ton	250.000.000	181.497.950	-68.502.050	APBD	APBD	10	Ton	150.000.000	a/b/c
3.27.02.2.06.0003	3. Sub Kegiatan	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	630	732	Ekor	434.373.600	2.998.120.000	2.563.746.400	APBD	APBD	10	Ekor	750.000.000	a/b/c
3.27.03	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	15,00	15,00	%	12.368.195.560	13.720.160.297	1.351.964.737	APBD	APBD	15,00%	%	5.408.700.000	a/b/c
3.27.03	1. Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0,90	0,90	%	-	-	-	-	-	0,90%	%		a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.03.2.01	2. Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian	Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	Dokumen	902.594.960	1.122.732.304	220.137.344	APBD	APBD	4	Dokumen	688.700.000	a/b/c
3.27.03.2.01	2. Kegiatan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100,00	100,00	%	-	-	-	-	-	0	%		a/b/c
3.27.03.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	2	Laporan	75.000.000	90.224.354	15.224.354	APBD	APBD	2	Laporan	115.000.000	a/b/c
3.27.03.2.01.0017	3. Sub Kegiatan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kelompok Tani dan Internal Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	2	Dokumen	827.594.960	1.032.507.950	204.912.990	APBD	APBD	2	Dokumen	573.700.000	a/b/c
3.27.03.2.02	2. Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara	Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7	3	Unit	11.465.600.600	12.597.427.993	1.131.827.393	APBD	APBD	3	Unit	4.720.000.000	a/b/c
3.27.03.2.02	2. Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	280,00	280,00	Ha	-	-	-	-	-	258,723	Ha		a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.03.2.02.0003	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Unit	1.244.740.000	3.162.919.600	1.918.179.600	APBD	APBD, DBH-CHT	1	Unit	530.000.000	a/b/c
3.27.03.2.02.0009	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	Unit	600.000.000	695.514.200	95.514.200	APBD	APBD	3	Unit	3.600.000.000	a/b/c
3.27.03.2.02.0010	3. Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kelompok Tani dan UPTD Dinas Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	46	46	Unit	9.145.860.600	8.322.294.445	-823.566.155	APBD	APBD	4	Unit	360.000.000	a/b/c
3.27.03.2.02.0015	3. Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	UPTD RPH	UPTD RPH	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	1	Unit	475.000.000	416.699.748	-58.300.252	APBD	APBD	2	Unit	230.000.000	a/b/c
3.27.04	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase status kesehatan hewan ternak	Persentase status kesehatan hewan ternak	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	74,00	74,00	%	3.060.000.000	2.722.403.410	-337.596.590	APBD	APBD	74,50%	%	2.158.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.04	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	85,20	85,20	%	-	-	-	-	-	85,20%	%		a/b/c
3.27.04.2.01	2. Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	PMHS	1.140.000.000	742.430.075	-397.569.925	APBD	APBD	4	PMHS	885.000.000	a/b/c
3.27.04.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	450.000.000	417.816.375	-32.183.625	APBD	APBD	12	Laporan	425.000.000	a/b/c
3.27.04.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Wilayah	450.000.000	147.751.950	-302.248.050	APBD	APBD	1	Wilayah	250.000.000	a/b/c
3.27.04.2.01.0008	3. Sub Kegiatan	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	240.000.000	176.861.750	-63.138.250	APBD	APBD	1	Laporan	210.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.04.2.02	2. Kegiatan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya	Kelompok Tani/Peternak dan Penjual Ternak	Kelompok Tani/Peternak dan Penjual Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10.200	10.200	ekor	635.000.000	323.031.850	-311.968.150	APBD	APBD	10200	ekor	446.000.000	a/b/c
3.27.04.2.02.0004	3. Sub Kegiatan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Penjual Ternak atau Hewan	Penjual Ternak atau Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	275.000.000	107.038.650	-167.961.350	APBD	APBD	1	Laporan	201.000.000	a/b/c
3.27.04.2.02.0006	3. Sub Kegiatan	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM	Kelompok Tani/Peternak dan Penjual Ternak	Kelompok Tani/Peternak dan Penjual Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	laporan	360.000.000	215.993.200	-144.006.800	APBD	APBD	1	laporan	245.000.000	a/b/c
3.27.04.2.03	2. Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	Jumlah wilayah pelayanan Puskesmas dilayani	Kelompok Tani/Peternak dan Pemilik Hewan	Kelompok Tani/Peternak dan Pemilik Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	31	31	Kecamatan	550.000.000	813.864.646	263.864.646	APBD	APBD	31	Kecamatan	542.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg		
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Kabupaten/Kota																			
3.27.04.2.03.0002	3. Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kelompok Tani/Ternak dan Pemilihan Hewan	Kelompok Tani/Ternak dan Pemilihan Hewan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	550.000.000	813.864.646	263.864.646	APBD	APBD	1	Laporan	542.000.000	a/b/c	
3.27.04.2.04	2. Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH	Kelompok Tani/Ternak	Kelompok Tani/Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8	8	lokasi	735.000.000	843.076.839	108.076.839	APBD	APBD	8	lokasi	285.000.000	a/b/c	
3.27.04.2.04.0002	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kelompok Tani/Ternak	Kelompok Tani/Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	Laporan	200.000.000	150.239.400	-49.760.600	APBD	APBD	0	Laporan	-	a/b/c	
3.27.04.2.04.0004	3. Sub Kegiatan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kelompok Tani/Ternak	Kelompok Tani/Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Dokumen	185.000.000	161.286.700	-23.713.300	APBD	APBD	1	Dokumen	235.000.000	a/b/c	
3.27.04.2.04.0005	3. Sub Kegiatan	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Kelompok Tani/Ternak	Kelompok Tani/Ternak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	Unit Usaha	125.000.000	74.950.750	-50.049.250	APBD	APBD	1	Unit Usaha	50.000.000	a/b/c	

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Kegiatan	
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.04.2.04.0010	3. Sub Kegiatan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Jumlah Unit Usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	UPTD RPH	UPTD RPH	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	3	Unit Usaha	225.000.000	456.599.989	231.599.989	APBD	APBD	1	Unit Usaha	-	a/b/c
3.27.05	1. Program	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0,00	0,00	%	2.398.965.489	2.953.513.950	554.548.461	APBD	APBD	0,18 %	%	869.451.189	a/b/c
3.27.05.2.01	2. Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50,00	50,00	Ha	2.398.965.489	2.953.513.950	554.548.461	APBD	APBD	60	Ha	869.451.189	a/b/c
3.27.05.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	40,00	40,00	Ha	1.370.536.889	1.216.244.150	-154.292.739	APBD	APBD	50	Ha	343.451.189	a/b/c
3.27.05.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5,00	5,00	Ha	858.428.600	1.714.089.200	855.660.600	APBD	APBD	5	Ha	350.000.000	a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg		
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
3.27.05.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5,00	5,00	Ha	170.000.000	23.180.600	-146.819.400	APBD	APBD	5	Ha	176.000.000	a/b/c	
3.27.06	1. Program	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan	Pemilik Usaha Pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100,00	100,00	%	380.000.000	371.663.340	-	8.336.660	APBD	APBD	100%	%	405.000.000	a/b/c
3.27.06.2.01	2. Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10	10	Pelaku usaha	380.000.000	371.663.340	-	8.336.660	APBD	APBD	60	Pelaku usaha	405.000.000	a/b/c
3.27.06.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10	10	Dokumen	125.000.000	100.206.600	-24.793.400	APBD	APBD	10	Dokumen	100.000.000	a/b/c	
3.27.06.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pemilik Usaha Pertanian	Pemilik Usaha Pertanian	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	2	Laporan	255.000.000	271.456.740	16.456.740	APBD	APBD	2	Laporan	305.000.000	a/b/c	
3.27.07	1. Program	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Persentase peningkatan kelas kelompok Tani	Kelompok Tani dan	Kelompok Tani dan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	11,00	11,00	%	35.785.350.000	41.564.450.865	5.779.100.865	APBD	APBD	11,49%	%	1.250.000.000	a/b/c	

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)												Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg		
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Penyuluh	Penyuluh															
3.27.07.2.01	2. Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan penyuluhan pertanian	Cakupan penyuluhan pertanian	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	31	31	kecamatan	35.785.350.000	41.564.450.865	5.779.100.865	APBD	APBD	31	kecamatan	1.250.000.000		a/b/c
3.27.07.2.01	2. Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	31	31	kecamatan	-	-	-	-	-	31	kecamatan	-		a/b/c
3.27.07.2.01.0001	3. Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	31	31	unit	260.000.000	387.508.100	127.508.100	APBD	APBD	31	unit	200.000.000		a/b/c
3.27.07.2.01.0002	3. Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50	1.370	Unit	34.785.250.000	40.349.758.865	5.564.508.865	APBD	APBD, DBH-CHT	50	Unit	450.000.000		a/b/c
3.27.07.2.01.0003	3. Sub Kegiatan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30	30	Unit	400.100.000	158.715.700	-241.384.300	APBD	APBD	30	Unit	250.000.000		a/b/c
3.27.07.2.01.0005	3. Sub Kegiatan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kelompok Tani dan Penyuluh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3	3	Unit	340.000.000	119.762.200	-220.237.800	APBD	APBD	3	Unit	350.000.000		a/b/c

Kode Rekening	Level	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)		Jenis Keg
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Satuan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3.27.07.2.01.0006	3. Sub Kegiatan	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	Penyuluh Pertanian	-	Kabupaten Bandung	0	113	orang	-	548.706.000	548.706.000	-	DAK NON FISIK	0	orang	-	a/b/c
JUMLAH												116.062.550.381	133.755.685.232	17.693.134.851					66.407.515.899	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan merupakan turunan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Pertanian merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (Renja).

Dalam menunjang pencapaian kebijakan strategis pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 bidang Pertanian, yaitu Peningkatan Daya Saing Daerah, pada Tahun 2025 Dinas Pertanian melaksanakan beberapa program strategis di antaranya:

- Kartu Tani Sibedas, merupakan penjabaran dari strategi perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Petani. Sasaran program ini adalah kelompok tani yang diakui dan teregistrasi di dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, bertujuan dalam memberikan stimulan sarana produksi pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas usahanya.
- Upaya perlindungan kepada petani juga di jabarkan berupa pendaftaran petani mengikuti program BPJS Ketenaga kerjaan.
- Peningkatan daya saing petani melalui pendekatan Klaster komoditi pertanian unggulan. Pengembangan daya saing petani melalui pendekatan pengembangan klaster komoditi pertanian unggulan merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran produk pertanian dalam suatu wilayah tertentu. Pendekatan ini berfokus pada kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk petani, pemerintah, industri terkait, lembaga riset, dan masyarakat

setempat, guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian. Terdapat beberapa komoditi pertanian unggulan dan penting, tidak hanya lingkup wilayah Kabupaten Bandung, juga menopang kebutuhan pangan tingkat regional, nasional bahkan komoditi ekspor. Pada Sub sector Tanaman Pangan, terdapat komoditi Padi (produk kabupaten Bandung termasuk golongan padi premium) dan Jagung yang salah satu program strategis nasional. Pada sub sector hortikultura, Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra produksi bawang merah, kentang dan sayuran hijau di Jawa Barat. Pada sub sector Perkebunan, komoditi primadona Kabupaten Bandung adalah Kopi, yang tidak hanya merupakan komoditi nasional tetapi juga merupakan komoditi andalan ekspor pertanian Indonesia. Pada sub sektor Peternakan, Kabupaten Bandung merupakan salah satu penghasil susu terbesar di Jawa Barat, yang memasok kebutuhan bahan baku susu segar bagi beberapa Industri Pengolah Susu (IPS) yang berada di Jawa Barat dan berskala nasional.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 memuat penjabaran dari rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian sasaran dinas. Dari segi penganggaran, program dan kegiatan dilaksanakan sesuai urusan kewenangan Dinas Pertanian, yaitu Urusan Belanja Rutin dan Urusan Belanja Program Pilihan Pertanian. Secara total anggaran yang dikelola pada Perubahan Tahun 2025 berjumlah Rp.133.755.685.232,00 terdiri dari Belanja Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp.49.918.090.930,00 dan Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp.83.837.594.302,00. Anggaran sebesar tersebut berasal dari tambahan anggaran dari berbagai sumber.

Kronologi Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

<u>Sumber Dana</u>	<u>Murni (Rp.)</u>	<u>Parsial 1 (Rp.)</u>	<u>RKPD-P (Rp.)</u>
APBD	125.538.726.530	130.187.100.211	128.578.539.311
DAK Non Fisik	0	548.706.000	548.706.000
DBHCHT	0	4.000.000.000	4.451.440.975
Silpa DAK Fisik	0	0	355.000
Silpa DAK Non Fisik	0	0	176.643.946
TOTAL	125.538.726.530	134.735.806.211	133.755.685.232

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Evaluasi capaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I serta sinkronisasi dengan dokumen Perencanaan Daerah (Perubahan RKPD Tahun 2025). Dinas Pertanian Kabupaten Bandung bersama dengan TAPD, seyogianya memperhatikan konsistensi antara Perubahan Renja tahun 2025 dengan alokasi anggaran dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang Tahun 2025 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Bapperida Kabupaten Bandung. Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun 2025 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERTANIAN

ttd

NINGNING HENDASAH

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



**DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025**